



PROFIL KEPENDUDUKAN KABUPATEN BULUNGAN 2024



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BULUNGAN**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bulungan tahun 2024.

Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bulungan tahun 2024 diharapkan dapat memberikan gambaran keadaan kependudukan Kabupaten Bulungan dalam kurun waktu tahun 2023, dan diharapkan pula agar dapat menjadi sumber data bagi yang membutuhkan dalam rangka penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Pengambilan Kebijakan secara umum untuk Kabupaten Bulungan khususnya mengenai gambaran tentang kondidi kependudukan di Kabupaten Bulungan yang meliputi kuantitas, kualitas, mobilitas dan persebaran penduduk melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Kami menyadri bahwa dalam Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bulungan tahun 2024 masih terdapat kekurangan dan kelemahan baik dalam data maupun Bahasa, maka kami sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang positif untuk kesempurnaan penyusunan pada waktu yang akan datang.

Tanjung Selor, April 2024

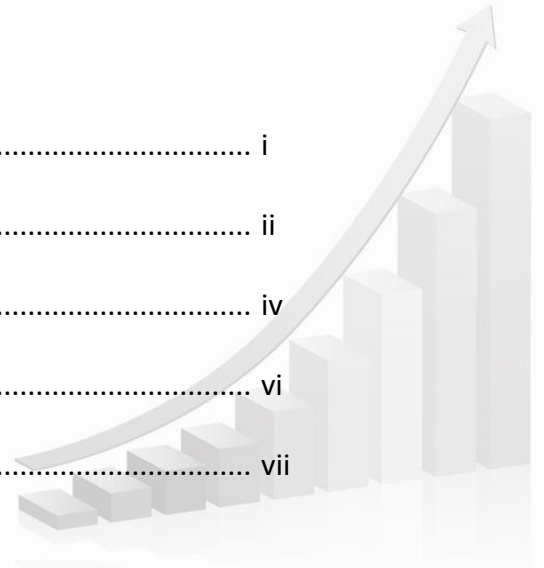
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan



H. Jamaluddin Saleh, S.Pd
NIP. 196807261997021004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vii



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	I - 1
B. Peraturan Perundangan	I - 2
C. Tujuan, Sasaran, dan Manfaat	I - 4
D. Ruang Lingkup	I - 4
E. Pengertian Umum / Daftar Istilah Kependudukan	I - 5

BAB II KONDISI UMUM KABUPATEN BULUNGAN

A. Letak Geografis	II - 1
B. Kondisi Topografi	II - 2
C. Kondisi Iklim	II - 5
D. Profil Kecamatan	II - 6

BAB III KUANTITAS PENDUDUK

A. Persebaran (Distribusi) Penduduk	III - 1
B. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi	III - 9
C. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial	III - 18

BAB IV KUALITAS PENDUDUK

A. Kesehatan	IV - 1
B. Perekonomian	IV - 5

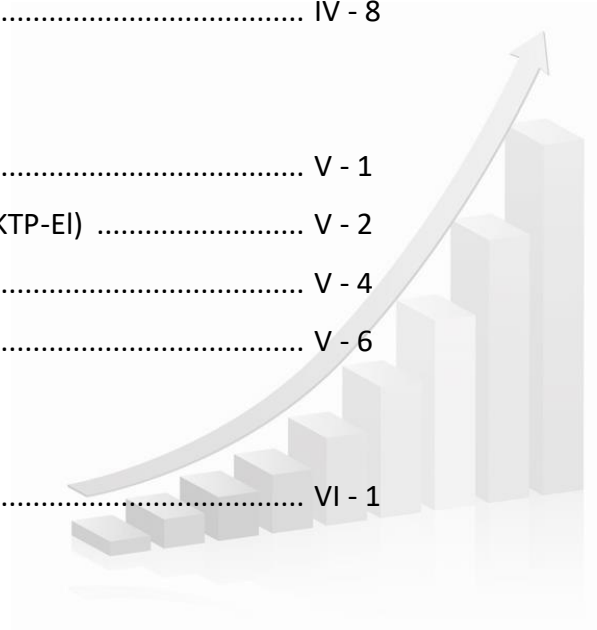
C. Sosial IV - 8

BAB V KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

A. Kepemilikan Kartu Keluarga V - 1
B. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik(KTP-EI) V - 2
C. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) V - 4
D. Kepemilikan Akta V - 6

BAB VI PENUTUP

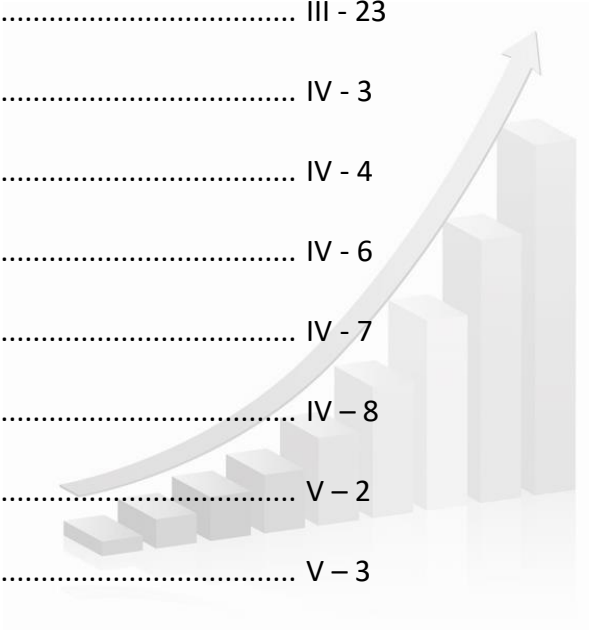
Penutup VI - 1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Topografi Wilayah	II - 3
Tabel 2.2.	Klarifikasi Lereng	II - 3
Tabel 3.1.	Jumlah Penduduk per Kecamatan	III - 2
Tabel 3.2.	Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Palas	III - 4
Tabel 3.3.	Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Palas Barat	III - 4
Tabel 3.4.	Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Palas Utara	III - 4
Tabel 3.5.	Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Palas Timur	III - 5
Tabel 3.6.	Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Selor	III - 5
Tabel 3.7.	Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Palas Tengah	III - 5
Tabel 3.8.	Jumlah Penduduk Kecamatan Peso	III - 5
Tabel 3.9.	Jumlah Penduduk Kecamatan Peso Hilir	III - 6
Tabel 3.10.	Jumlah Penduduk Kecamatan Sekatak	III - 6
Tabel 3.11.	Jumlah Penduduk Kecamatan Bunyu	III - 7
Tabel 3.12.	Pertumbuhan Penduduk Tahun 2019-2023	III - 9
Tabel 3.13.	Jumlah Penduduk Menurut Umur	III - 10
Tabel 3.14.	Jumlah Penduduk berdasarkan rasio jenis kelamin	III - 12
Tabel 3.15.	Rasio Ketergantungan	III - 16
Tabel 3.16.	Rasio Status Perkawinan	III - 17
Tabel 3.17.	Komposisi Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir	III - 19
Tabel 3.18.	Jumlah Pemeluk Agama / Kepercayaan	III - 20

Tabel 3.19. Jumlah Rata-rata Anggota Keluarga	III - 23
Tabel 4.1. Angka Kelahiran Menurut Usia.....	IV - 3
Tabel 4.2. Rasio Anak dan Perempuan	IV - 4
Tabel 4.3. Jenis Pekerjaan Penduduk	IV - 6
Tabel 4.4. Jumlah Angka Pengangguran	IV - 7
Tabel 4.5. Angka Penyandang Cacat (Disabilitas)	IV - 8
Tabel 5.1. Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga	V - 2
Table 5.2. Presentase Kepemilikan KTP-El	V - 3
Table 5.3. Presentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	V - 4
Table 5.4. Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran	V - 6
Table 5.5. Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18) Tahun	V - 7
Tabel 5.6. Presentase Kepemilikan Akta Perkawinan	V - 9
Table 5.7. Presentase Kepemilikan Akta Perceraian	V - 11
Table 5.8. Presentase Kepemilikan Akta Kematian	V - 13



DAFTAR GAMBAR / GRAFIK

Gambar 2.1	Peta Kabupaten Bulungan	II – 2
Grafik 3.1.	Jumlah Penduduk	III - 3
Grafik 3.2.	Rasio Kepadatan Penduduk	III - 8
Grafik 3.3.	Rasio Jenis Kelamin	III - 13
Grafik 3.4.	Piramida Penduduk Menurut Umur	III - 14
Grafik 3.5.	Rasio Status Perkawinan	III - 18
Grafik 3.6.	Jumlah Pemeluk Agama / Kepercayaan	III - 21
Grafik 3.7.	Jumlah Rata-rata Anggota Keluarga	III - 24
Grafik 4.1.	Angka Kelahiran Menurut Usia	IV - 3
Grafik 4.2.	Rasio Anak dan Perempuan	IV - 5
Grafik 5.1.	Presentase Kepemilikan KTP-El	V - 4
Grafik 5.2.	Presentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	V - 5
Grafik 5.3.	Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran	V - 7
Grafik 5.4.	Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18) Tahun	V - 8
Grafik 5.5.	Presentase Kepemilikan Akta Perkawinan	V - 10
Grafik 5.6.	Presentase Kepemilikan Akta Perceraian	V - 12
Grafik 5.7.	Presentase Kepemilikan Akta Kematian	V - 14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup/sumber daya alam pada masing-masing kabupaten/kota terbentuk dari hasil proses pembangunan yang telah dilaksanakan selama tiga dekade yang lalu secara sistematis dan berkelanjutan dalam sistem sentralistik. Dalam rangka menunjang peningkatan kemampuan aparat pemerintah daerah dalam hal perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan

di tingkat kabupaten/kota belum secara tuntas mengatasi permasalahan kependudukan dan tindakan yang dilakukan masih bersifat reaktif dan cenderung normatif.

Demikian halnya dalam era otonomi daerah diharapkan terjadi pergeseran paradigma dimana pola-pola pembangunan yang bersifat mobilisasi kehendak pemerintah kearah pola pembangunan parsitipatif dengan perencanaan yang bersifat “bottom up”. Pola pembangunan yang demikian dikenal dengan istilah pembangunan berwawasan kependudukan. Penyusunan analisis kependudukan dimaksud sebagai salah satu upaya dalam mengantisipasi dan mengendalikan kependudukan sejak dini yang ditimbulkan oleh adanya perubahan sistem penduduk yang akan terjadi dikemudian hari. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun perencanaan dan menetapkan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengamanatkan agar pembangunan di bidang kependudukan juga dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang bertujuan menyediakan data dan informasi kependudukan skala nasional, provinsi dan kota/kabupaten, dan dapat dijadikan acuan dasar bagi sektor atau lembaga-lembaga lain (pemerintah maupun swasta) dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan serta untuk memenuhi kebutuhan informasi maka Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bulungan Tahun 2024.

Penyusunan Buku Profil Perkembangan Penduduk Kabupaten Bulungan Tahun 2024 ini adalah usaha untuk menyediakan data kependudukan yang valid, yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan tersimpan didalam basis data kependudukan, serta dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan pembangunan di Kabupaten Bulungan maupun pemerintah pusat.

Variabel data yang disajikan disini adalah hasil registrasi kependudukan di tiap-tiap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota. Variabel-variabel tersebut meliputi kuantitas penduduk, kualitas penduduk, mobilitas penduduk, dan kepemilikan dokumen-dokumen kependudukan.

B. Peraturan Perundangan

1. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 112 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 695).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/837/SJ Tahun 2018 tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan

C. Tujuan, Sasaran dan Manfaat

I. Tujuan

Analisis kependudukan ini ditujukan untuk memberi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang hasilnya akan dijadikan masukan dalam Perencanaan Pelaksanaan dan Evaluasi Pemerintah Daerah.

II. Sasaran

Sasaran dari penyusunan analisis kependudukan adalah:

- a. Tersusunnya hasil perkembangan penduduk terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup di suatu wilayah (Kabupaten/Kota).
- b. Terumuskannya bahan masukan untuk perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mencegah dan mengendalikan masalah kependudukan.

III. Manfaat

Manfaat disusunnya analisis kependudukan adalah untuk mengantisipasi sejak dini masalah kependudukan yang akan datang.

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penyusunan profil perkembangan kependudukan ini mencakup lima hal pokok yaitu antara lain:

- 1) Menyajikan perkembangan kependudukan secara kuantitatif sehingga tampak jelas apa yang sudah berlangsung;
- 2) Mengidentifikasi kelompok atau segmen kependudukan yang membutuhkan perhatian khusus dan upaya-upaya yang diperlukan sehingga mendapat pelayanan tepat sasaran;
- 3) Dari point 1) dan 2) teridentifikasi potensi penduduk yang dapat dijadikan aset pembangunan daerah dan nasional;
- 4) Mengkoordinasikan, melakukan evaluasi dengan instansi terkait untuk memperoleh kesepakatan dan kesepakatan dalam penyusunan dan pemanfaatannya;

5) Mendorong percepatan terwujudnya satu data kependudukan untuk analisa pembangunan daerah.

Buku Profil Perkembangan Penduduk Kabupaten Bulungan Tahun 2019 ini secara garis besar menyajikan data sebagai berikut:

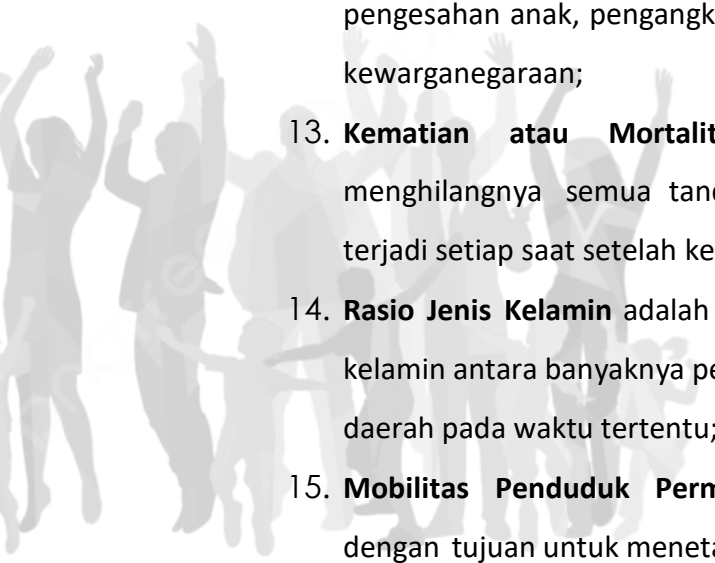
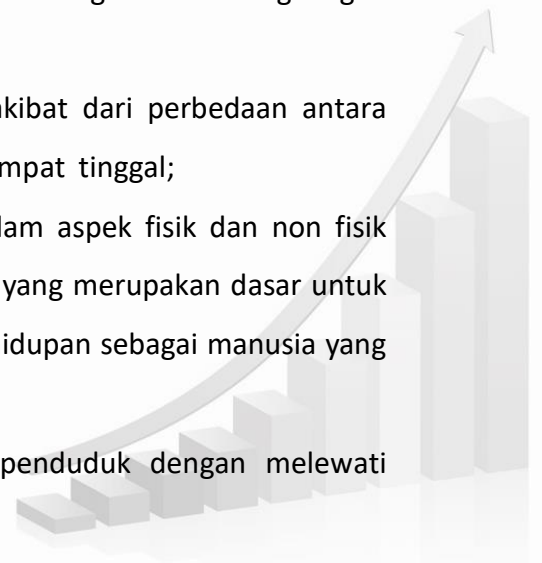
- A. Persebaran (Distribusi) Penduduk
- B. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi
- C. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
- D. Kualitas Penduduk : Kesehatan, Pendidikan, Perekonomian, Angka Pengangguran
- E. Kepemilikan Dokumen Kependudukan
 1. Kepemilikan Kartu Keluarga
 2. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk
 3. Kepemilikan Akta : Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, dan Akta Perceraian

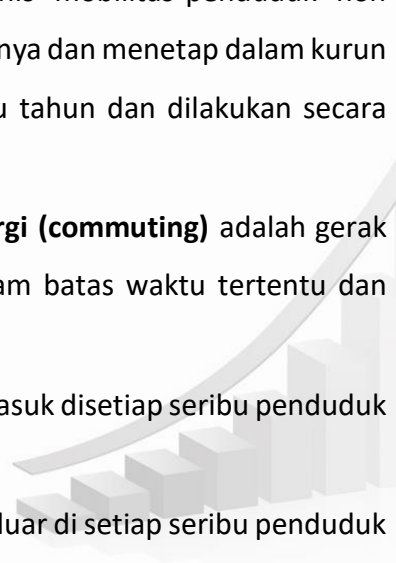
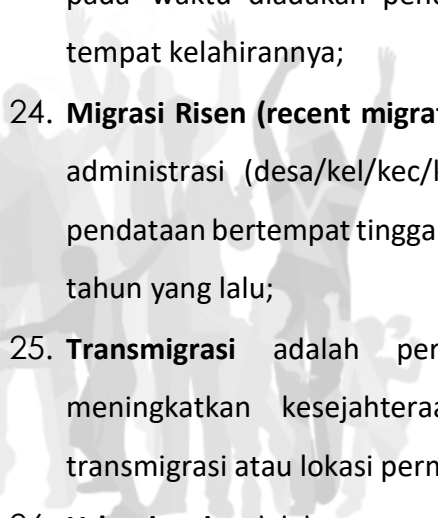
E. Pengertian Umum / Daftar Istilah Kependudukan

1. **Penduduk** adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang yang bertempat tinggal di Indonesia;
2. **Kependudukan** adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat;
3. **Administrasi Kependudukan** adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hal lainnya untuk pelayanan publik dan pembangunan di berbagai sektor;
4. **Data Kependudukan** adalah data perorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
5. **Perkembangan Kependudukan** adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang meliputi kuantitas, kualitas dan

mobilitas yang mempunyai pengaruh terhadap pembangunan dan lingkungan hidup;

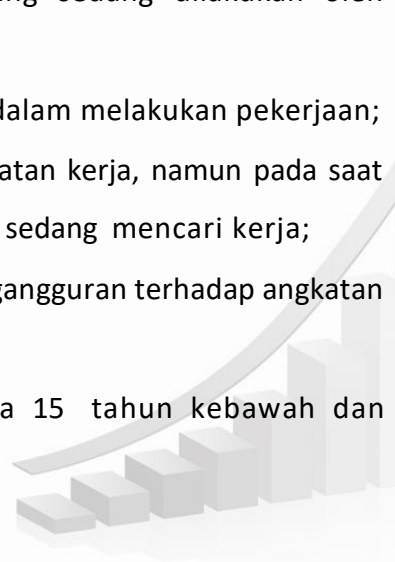
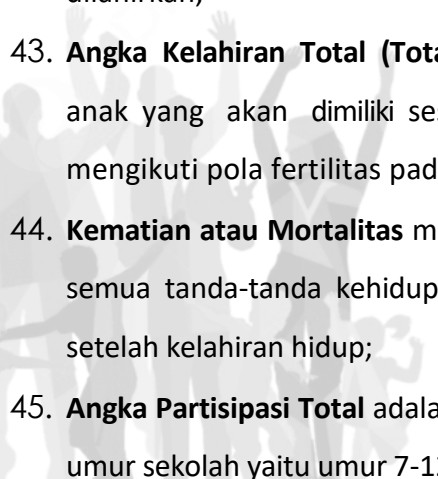
6. **Kuantitas Penduduk** adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal;
7. **Kualitas Penduduk** adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian dan bermartabat;
8. **Mobilitas Penduduk** adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas administrasi;
9. **Profil Perkembangan Kependudukan** adalah kumpulan data dan informasi tentang perkembangan kependudukan dalam bentuk tertulis, yang mencakup segala kegiatan yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang meliputi kuantitas, kualitas dan mobilitas yang mempunyai pengaruh terhadap pembangunan dan lingkungan hidup;
10. **Persebaran Penduduk** adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan;
11. **Peristiwa Kependudukan** adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan;
12. **Peristiwa Penting** adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;
13. **Kematian atau Mortalitas** menurut WHO adalah suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup;
14. **Rasio Jenis Kelamin** adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan jenis kelamin antara banyaknya penduduk laki-laki dan penduduk perempuan disuatu daerah pada waktu tertentu;
15. **Mobilitas Penduduk Permanen (migrasi)** adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional);

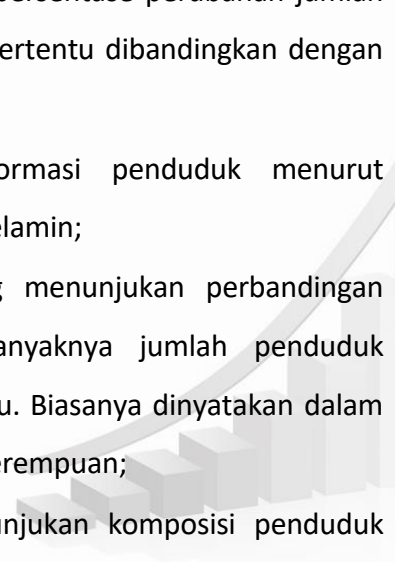


- 
- 
16. **Penduduk Musiman** merupakan salah satu jenis mobilitas penduduk non permanen yang bekerja tidak pada daerah domisilinya dan menetap dalam kurun waktu lebih dari satu hari tetapi kurang dari satu tahun dan dilakukan secara berulang;
 17. **Mobilitas Penduduk Pulang-Balik atau Pulang-Pergi (commuting)** adalah gerak penduduk dari daerah asal ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dan kembali ke daerah asal pada hari yang sama;
 18. **Angka Migrasi Masuk** adalah banyaknya migrasi masuk disetiap seribu penduduk dalam satu tahun;
 19. **Angka Migrasi Keluar** adalah banyaknya migran keluar di setiap seribu penduduk dalam satu tahun;
 20. **Angka Migrasi Netto** adalah selisih banyaknya migran masuk dan keluar disetiap seribu penduduk dalam satu tahun;
 21. **Angka Migrasi Bruto** adalah jumlah migrasi masuk (datang) dan jumlah migrasi keluar (pindah) disetiap seribu penduduk dalam satu tahun;
 22. **Migrasi Kembali (return migration)** adalah banyaknya penduduk yang pada waktu diadakan pendataan bertempat tinggal di daerah yang sama dengan tempat lahir dan pernah bertempat tinggal di daerah yang berbeda;
 23. **Migrasi Semasa Hidup (life time migration)** adalah bentuk migrasi dimana pada waktu diadakan pendataan tempat tinggal sekarang berbeda dengan tempat kelahirannya;
 24. **Migrasi Risen (recent migration)** adalah bentuk migrasi melewati batas wilayah administrasi (desa/kel/kec/kab/kota/provinsi) dimana pada waktu diadakan pendataan bertempat tinggal di daerah yang berbeda dengan tempat tinggal lima tahun yang lalu;
 25. **Transmigrasi** adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi;
 26. **Urbanisasi** adalah suatu proses bertambahnya konsentrasi penduduk di perkotaan dan atau proses perubahan suatu daerah perdesaan menjadi

perkotaan, baik secara fisik maupun ukuran-ukuran spasial dan/atau bertambahnya fasilitas perkotaan, serta lembaga-lembaga sosial, maupun perilaku masyarakatnya;

27. **Penduduk Usia Kerja** adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun;
28. **Penduduk yang Termasuk Angkatan Kerja** adalah penduduk usia kerja (15-64 tahun) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha;
29. **Penduduk yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja** adalah penduduk usia kerja (15-64 tahun) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, dan pensiun;
30. **Bekerja** adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduk dan disampaikan penduduk sebagai pekerjaannya pada saat melaporkan biodatanya kepada petugas registrasi penduduk di kelurahan/desa/dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
31. **Angka Partisipasi Angkatan Kerja** adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja;
32. **Sekolah** adalah kegiatan seseorang untuk bersekolah di sekolah formal, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tertinggi, termasuk pula kegiatan dari mereka yang sedang libur sekolah;
33. **Mengurus Rumah Tangga** adalah kegiatan seseorang yang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, misalnya : ibu-ibu rumah tangga dan anaknya yang membantu rumah tangga; sebaliknya pembantu rumah tangga yang mendapat upah walaupun pekerjaannya mengurus rumah tangga dianggap bekerja;
34. **Kegiatan lainnya** adalah mereka yang melakukan suatu pekerjaan diluar jenis pekerjaannya yang telah ditetapkan;
35. **Pendidikan tertinggi yang Ditamatkan** adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah);

- 
- 
36. **Jenis Pekerjaan** adalah macam pekerjaan yang sedang dilakukan oleh penduduk;
37. **Status Pekerjaan** adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan;
38. **Pengangguran** adalah orang yang termasuk angkatan kerja, namun pada saat pendataan/survey atau sensus tidak bekerja dan sedang mencari kerja;
39. **Angka Pengangguran** adalah proporsi jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja;
40. **Bukan Angkatan Kerja** adalah penduduk usia 15 tahun kebawah dan penduduk berusia 64 tahun keatas;
41. **Lahir Hidup** adalah
- suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya didalam kandungan, dimana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan, misalnya ada nafas, ada denyut jantung atau denyut tali pusar atau gerakan otot;
 - banyaknya kelahiran hidup dari sekelompok atau beberapa kelompok wanita selama masa reproduksinya;
42. **Lahir mati** adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda -tanda kehidupan pada saat dilahirkan;
43. **Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)** adalah rata-rata banyaknya anak yang akan dimiliki seseorang wanita pada masa reproduksinya jika ia mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung;
44. **Kematian atau Mortalitas** menurut WHO adalah suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup;
45. **Angka Partisipasi Total** adalah proporsi penduduk bersekolah menurut golongan umur sekolah yaitu umur 7-12,13-15,16-18, dan 19-24 tahun;

- 
46. **Angka Pertumbuhan Penduduk** adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya;
 47. **Proporsi Penduduk** adalah jumlah dan informasi penduduk menurut pengelompokan tertentu, seperti umur dan jenis kelamin;
 48. **Rasio Jenis Kelamin** adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan;
 49. **Piramida Penduduk** adalah gambar yang menunjukkan komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik berbentuk piramida;
 50. **Rasio Kepadatan Penduduk** adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau beberapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada periode tahun tertentu;



BAB II

KONDISI UMUM KABUPATEN BULUNGAN

Sebelum membahas berbagai hal terkait profil kependudukan perlu dipahami secara umum tentang Kabupaten Bulungan. Tidak hanya uraian letak geografis daerah tetapi juga menyangkut kondisi demografis daerah, gambaran ekonomi dan potensi daerah. Uraian itu diharapkan dapat memberikan gambaran latar belakang Kabupaten bulungan sebelum membahas ihwal kependudukan.

A. Letak Geografis

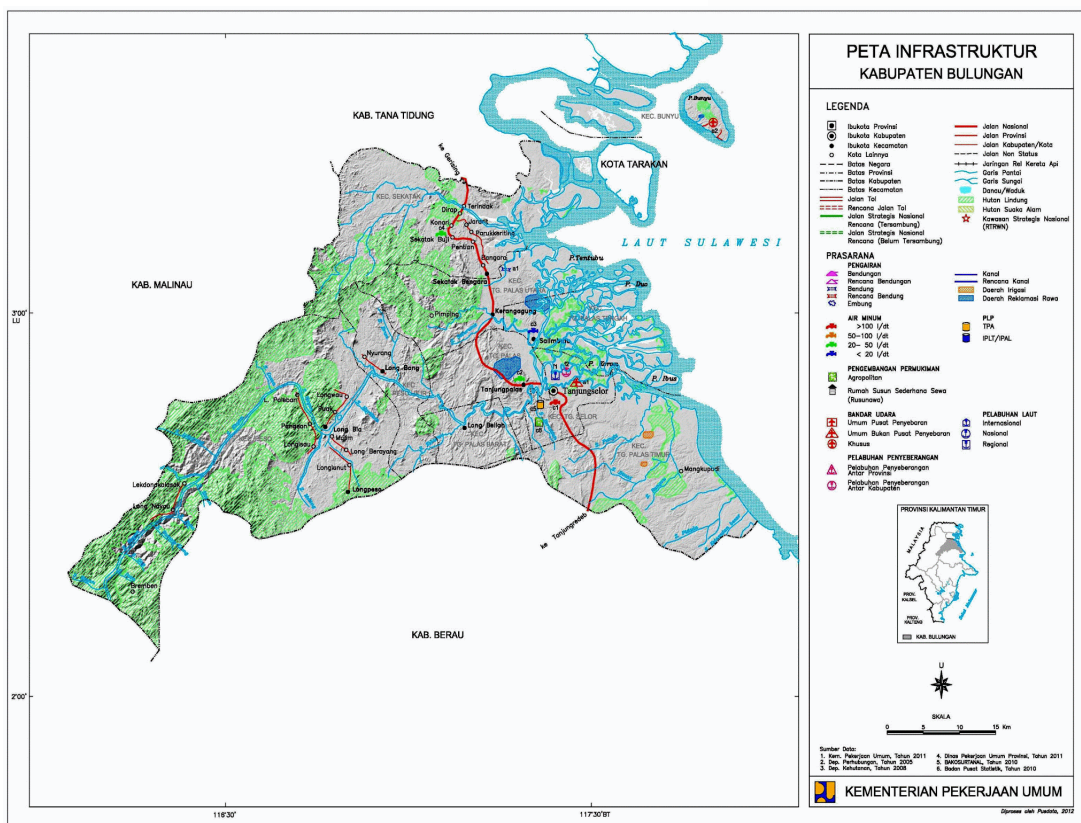
Kabupaten Bulungan sebagai salah satu kabupaten di bagian utara pulau Kalimantan, mempunyai luas 18.010,50 Km² terletak antara 116⁰04'41" sampai dengan 117⁰57'56" Bujur Timur dan 2⁰09'19" sampai dengan 3⁰34'49" Lintang utara. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2007

Tentang pembentukan kabupaten tanah Tidung di Propinsi Kalimantan Utara maka luas Kabupaten Bulungan berkurang menjadi 13.181,92 km². Adapun batas-batas kabupaten Bulungan; Sebelah utara dengan Kabupaten tana Tidung dan kabupaten Nunukan, sebelah Timur dengan Laut sulawesi dan kota tarakan , sebelah Selatan dengan Kabupaten Berau sebelah Barat dengan kabupaten malinau.

Kondisi Kabupaten Bulungan memiliki beberapa pulau, yang dialiri puluhan sungai besar dan kecil, serta secara topografi memiliki daratan yang berbukit-bukit, bergunung-gunung dengan tebing terjal dan kemiringan yang tajam.

Bentuk wilayah datar hanya dijumpai disebagian besar wilayah sepanjang garis pantai atau sepanjang daerah aliran sungai atau pada daerah

Gambar 2.1. Peta Kabupaten Bulungan



dengan fisiografi dataran alluvial sungai berupa tanggul dan rawa dengan kemiringan lahan kurang dari 2 persen. Adapun pulau yang terluas adalah pulau mandul di kecamatan Bunyu (38.737,413 ha) dan sungai yang terpanjang adalah sungai kayan (576 km: termasuk yang berada di wilayah kabupaten Malinau dan kabupaten tanah Tidung) sedangkan gunung yang tertinggi adalah gunung Kundas yang berada di Kecamatan Peso dengan ketinggian 1.670m.

B. Kondisi Topografi

Topografi adalah perbedaan tinggi atau bentuk wilayah suatu daerah, termasuk didalamnya perbedaan kemiringan lereng, panjang lereng, bentuk lereng, dan posisi lereng. Topografi dalam proses pembentukan tanah mempengaruhi : 1) jumlah air hujan yang meresap atau ditahan oleh tanah; 2) dalamnya air tanah; 3) besarnya erosi; 4) arah gerakan air berikut bahan terlarut di dalamnya dari satu tempat ke tempat lain. Topografi juga merupakan istilah luas yang digunakan untuk menggambarkan studi terperinci tentang permukaan bumi, termasuk perubahan pada permukaan seperti pegunungan dan lembah

serta fitur lainnya seperti sungai dan jalan. Kondisi topografi adalah elemen dasar suatu wilayah untuk mengetahui karakter fisik suatu daerah. Karakteristik fisik akan mempengaruhi pola dan jenis pembangunan yang akan diterapkan di wilayah tersebut. Kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan air laut merupakan indikator untuk mengetahui kondisi topografi di suatu daerah

Tabel 2.1: Topografi Wilayah

No	Kabupaten	Kelas Ketinggian					
		0-7 m	7-25 m	25-100 m	100-500 m	500-1000 m	>1000m
1	Bulungan	213.561	249.257	220.119	531.364	193.172	273.749

(Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2020)

Tabel di atas menunjukkan bahwa hamper sepertiga total luas wilayah Kabupaten Bulungan memiliki ketinggian antara 100-500 mdpl (31,21%), hanya sekitar 5,92% yang memiliki kelas ketinggian 500-1000 mdpl. Perkembangan pembangunan diperkirakan akan mengelompok di wilayah yang memiliki ketinggian relatif lebih landai, sedangkan wilayah pegunungan di Kabupaten Bulungan dapat dijadikan kawasan lindung dan recharge area (daerah resapan air).

Table 2.2: Klasifikasi Lereng

No	Kabupaten	Kelas Lereng/Kemiringan				Jumlah (Ha)
		0-2% (Datar)	2-15% (Sangat Landai/ Bergelombang)	15-40% (Agak Curam)	>40% (Sangat Curam)	
1	Bulungan	319.440	185.018	216.359	590.017	1.310.834

(Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2020)

Suatu permukaan tanah yang miring dengan sudut tertentu terhadap bidang horizontal disebut sebagai lereng. Lereng ini dapat terjadi secara alamiah atau buatan. Kemiringan lereng menunjukkan besarnya sudut lereng dalam persen atau derajat. Dua titik

yang berjarak horizontal 100 meter yang mempunyai selisih tinggi 10 meter membentuk lereng 10 persen. Kecuraman lereng 100 persen setara dengan kecuraman 45 derajat.

Kondisi topografi Kabupaten Bulungan didominasi oleh kemiringan lereng di atas 40%, khususnya wilayah bagian tengah dan barat yang sebagian besar merupakan hulu sungai. Pegunungan atau perbukitan yang tersebar di Kabupaten Bulungan yaitu sebagai berikut :Gunung/Bukit Brun, Ubut Lebung, Sombang, Bekayan, Sondong, Gunung Putih, Mara, Sekatak, Kelu, Kundas, Setarat, Takin, Silid, Rian, Aung, Jatu;

Pembangunan di atas tanah lereng memiliki resiko tinggi terhadap bahaya longsor. Faktor yang harus diperhatikan dalam menghindari kelongsoran adalah kemiringan lereng itu sendiri. Selain itu, pemilihan bentuk dan dimensi pondasi juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan guna memperoleh daya dukung yang diinginkan. Secara umum, ada beberapa jenis longsor yang sering terjadi di Indonesia, yaitu:

1. Longsoran Translasi: Bergeraknya material tanah pada kondisi tanah yang bertopografi rata atau menggelombang landai.
2. Longsoran Rotasi: merupakan pergerakan material tanah yang terjadi di dalam bidang yang berbentuk cekung sehingga seringkali terjadi perputaran atau rotasi di dalam bidang cekung tersebut.
3. Pergerakan Blok: merupakan pergerakan batuan yang ada di dalam tanah pada bidang yang datar atau landai. Kondisi ini juga seringkali dinamakan dengan longsoran blok batu dengan jumlah batu yang biasanya masif.
4. Runtuhan Batu: merupakan kondisi dimana terjadi runtuh batu secara langsung dan terjun bebas dari atas ke bawah. Hal ini biasanya terjadi pada bukit yang terjal dengan lereng yang cukup curam dan ini sering ditemukan di tebing pantai.
5. Rayapan Tanah: terjadi karena adanya rayapan atau pergerakan tanah yang sangat lambat dan halus. Ini biasanya terjadi pada tanah yang memiliki butiran kecil halus dan namun memiliki struktur yang cukup kasar. Biasanya jenis tanah longsor ini hampir tidak bisa dikenali dan kalau longsor sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama baru bisa dikenali dengan miringnya tiang-tiang listrik, rumah dan lainnya yang berada di atasnya.

6. Aliran Bahan Rombakan: terjadi karena adanya pergerakan tanah dan materialnya yang disebabkan oleh dorongan air yang sangat kuat. Kecepatan dari aliran air sendiri akan sangat tergantung pada kemiringan lereng, volume air, tekanan air, kecepatan air serta jenis material tanahnya itu sendiri apakah mudah terangkut oleh air atau tidak. Gerakan dari tanah longsor ini lumayan cepat dan bisa mencapai seluruh lembah dengan jarak ratusan meter jauhnya.

C. Kondisi Iklim

Iklim adalah keadaan cuaca suatu wilayah dalam jangka waktu yang panjang, biasanya 11-30 tahun. Indonesia secara keseluruhan dikelilingi oleh Samudra dan Lautan, sehingga memiliki iklim tropis basah. Secara umum, kondisi iklim Kabupaten Bulungan hampir sama dengan wilayah lain di Indonesia yaitu beriklim tropis, dengan ciri-ciri: (1) Setiap tahunnya suhu udara akan cukup tinggi, karena memperoleh sinar matahari yang cenderung vertikal; (2) Suhu udara rata-rata tidak kurang dari 18 derajat celsius bahkan sampai 27 derajat celsius. Saat mengalami musim hujan dan musim kemarau pun tidak memiliki perbedaan berarti. (3) Dalam setiap pergantian hari adalah 24 jam dimana siang dan malam hari masing-masing memiliki waktu selama 12 jam; (4) Wilayah iklim tropis basah membuat suatu wilayah ditumbuhi banyak tanaman hijau yang lebat. Wilayah ini mampu mempengaruhi perubahan iklim yang sangat signifikan.

Kondisi iklim suatu wilayah berpengaruh pada aspek sosial, ekonomi, dan kultural masyarakat setempat, sehingga corak kehidupan tiap wilayah juga pasti akan berbeda. Di bidang agraris (pertanian dan perkebunan), iklim berpengaruh signifikan terhadap pola pekerjaan pada bidang ini. Banyak petani dan pekebun di Bulungan yang mengandalkan iklim dalam bercocok tanam, misalnya tanaman yang cocok ditanam oleh petani/pekebun di musim hujan adalah padi, sawi, kubis, caisim, bayam, kangkung, terong, kacang panjang, timun, semangka, melon. Mereka biasanya juga memperhitungkan bulan jatuhnya panen agar tepat waktu. Tanaman yang cocok ditanam saat musim kemarau adalah jagung, ubi, ketela, tomat, kentang, kacang tanah, kacang hijau, labu. Jenis tanaman umbi-umbian justru menghasilkan kualitas umbi yang baik apabila dipanen saat musim kemarau. Sedangkan tanaman yang cocok ditanam di musim pancaroba (peralihan) diantaranya adalah padi, cabai, tomat, terong, timun, semangka, melon, umbi-umbian, dan sayur-sayuran.

D. Profil Kecamatan

1. Tanjung Selor

Kecamatan Tanjung Memiliki Luas Wilayah : $\pm 1.277,81 \text{ km}^2$ Jarak dan merupakan letak Ibukota Kabupaten. Adapun batas wilayah Kecamatan Tanjung Selor adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanjung Palas Timur;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Berau;
- Sebelah Utara : Kecamatan Tanjung Palas;
- Sebelah Barat : Kecamatan Tanjung Palas;

Kondisi geografis Kecamatan Tanjung Selor sebagian besar merupakan tanah datar dan sungai-sungai. Wilayah administratif pemerintahan Kecamatan Tanjung Selor membawahi 3 (tiga) wilayah pemerintahan Kelurahan yaitu : Tanjung Selor Hulu, Tanjung Selor Hilir dan Tanjung Selor Timur. Membawahi pula 6 (enam) desa, meliputi : Jelarai Selor, Gunung Seriang, Bumi Rahayu, Gunung Sari, Apung dan Tengkapak.

Kecamatan Tanjung Selor adalah ibukota kabupaten dan merupakan pusat pemerintahan. Masyarakatnya sangat beragam terdiri dari berbagai suku, seperti tidung, bulungan, dayak, bugis, jawa, dan suku-suku pendatang lainnya.

Dengan keragaman suku masyarakat membuat budayanya pun juga cukup beragam, sesuai dengan keradaan suku masyarakatnya. Namun dengan keragaman itulah membuat dinamika budaya pun mengalami proses akulturasi dan saling menghormati antar budaya dan masyarakatnya.

Sarana ibadah yang ada di wilayah ini terdiri dari mesjid 29 buah, langgar/mushalla 19 buah dan gereja 21 buah, Pura 1 buah, Vihara 1 Buah, Ta Pek Kong 1 buah.

Sarana Pendidikan : 8 TK, 31 SD/MI, 1 SDLB, 11 SLTP/MTs, 7 SLTA/MA dan 3 Perguruan Tinggi.

Potensi yang berada di wilayah Kecamatan Tanjung Selor, adalah sebagai berikut:

- a. Kehutanan, yang masih menyimpan potensi kayu-kayu log;
- b. Sangat cocok untuk perkebunan, karena hamparan tanah datarnya cukup luas.

- c. Pertambangan minyak di daerah Apung.
- d. Sector wisata yang berada di Km-18

2. Tanjung Palas

Kecamatan Tanjung Palas memiliki Luas Wilayah : $\pm 1.755,74 \text{ km}^2$ dengan Jarak ke ibukota Kabupaten : $\pm 2 \text{ km}$, Adapun batas wilayah Kecamatan Tanjung Palas adalah sebagai berikut:

- e. Sebelah Timur : Kecamatan Tanjung Selor;
- f. Sebelah Selatan : Kabupaten Berau;
- g. Sebelah Utara : Kecamatan Tanjung Palas Utara dan Tanjung Palas Tengah;
- h. Sebelah Barat : Kecamatan Tanjung Palas Barat;

Kondisi geografis Kecamatan Tanjung Palas sebagian besar merupakan tanah datar, bukit dan sungai-sungai. Wilayah administratif pemerintahan Kecamatan Tanjung Palas membawahi 4 (empat) Kelurahan yaitu Tanjung Palas Hulu, Tanjung Palas Tengah, Tanjung Palas Hilir dan Karang Anyar serta 5 (lima) pemerintahan desa meliputi : Gunung Putih, Antutan, Pejalin, Teras Nawang dan Teras Baru. Masyarakatnya sangat beragam terdiri dari berbagai suku, seperti tidung, bulungan, dayak, bugis, jawa, dan suku-suku pendatang lainnya.

Potensi wisata maupun alam yang berada di wilayah Kecamatan Tanjung Palas, adalah sebagai berikut:

- Wisata Alam Gunung Putih
- Musium Kesultanan Bulungan
- Wisata Budaya Adat Dayak Kenyah.
- Kehutanan, yang masih menyimpan potensi kayu-kayu log;
- Sangat cocok untuk perkebunan, karena hamparan tanah datarnya cukup luas.

3. Tanjung Palas Tengah

Kecamatan Tanjung Palas Tengah memiliki Luas Wilayah : $\pm 624,95 \text{ km}^2$ dengan Jarak ke ibukota Kabupaten : $\pm 50 \text{ km}$, Adapun batas wilayah Kecamatan Tanjung Palas Tengah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Tarakan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Tg. Palas Timur;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Selor dan Tanjung Palas;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Palas Utara dan Sekatak;

Sementara keadaan topografis wilayah sebagian besar datar berombak mencapai 90 % dan sebagian kecilnya berbukit mencapai 10 %.

Akses dari ibukota kecamatan ke Desa-desa yang ada sebagian bisa dicapai melalui darat seperti desa Salimbatu dengan waktu tempuh 15 menit dan Silva Rahayu (1 jam), sedangkan Desa Tanjung Buka hanya bisa ditempuh melalui jalur sungai yang waktu tempuhnya sekitar 1 jam menggunakan perahu long boat, ketinting dan speedboat.

Sebagai salah satu Kecamatan yang baru dimekarkan dari Kecamatan induk Tanjung Palas, jumlah desanya sebanyak 3 (tiga) Desa, yaitu: Desa Salimbatu, Desa Tanjung Buka, dan Desa Silva Rahayu.

Kecamatan Tanjung Palas Tengah merupakan salah satu daerah yang menjadi pemukiman transmigrasi. Sebagai tempat pemukiman transmigrasi membuat masyarakatnya pun cukup beragam terdiri dari berbagai suku, seperti tidung, bulungan, dayak, bugis, jawa dan timor.

Sesuai dengan keadaan topografi dan potensi wilayahnya, sebagian besar masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan nelayan tradisional.

Dengan keragaman suku masyarakat membuat budayanya pun juga cukup beragam, sesuai dengan keradaan suku masyarakatnya. Namun dengan keragaman itulah membuat dinamika budaya pun mengalami proses akulturasi dan saling menghormati antar budaya dan masyarakatnya.

Komoditi Khas dari Kecamatan Tanjung Palas Tengah:

- Perikanan, meliputi : ikan dan udang ekspor, ikan kering dan ebi (Desa Tanjung Buka)
- Pertanian : padi sawah (Desa salimbatu dan Desa Silva Rahayu)

Potensi wisata maupun alam yang berada di wilayah Kecamatan Tanjung Palas Tengah, adalah sebagai berikut:

- Wisata Agama : Kuburan Keramat Bilfaqih dan Al Jufri
- Wisata Sejarah : Kuburan Datu Adil
- Perkebunan kelapa sawit,
- Pertambangan Batu bara
- Pertambakan

4. Tanjung Palas Timur

Kecamatan Tanjung Palas Timur memiliki Luas Wilayah : 677,77 km² dengan Jarak ke ibukota Kabupaten : ± 86 km², Adapun batas wilayah Kecamatan Tanjung Palas Timur adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Selor/ Tanjung Palas;
- Sebelah Selatan berbatasan Kabupaten Berau;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Selor

Secara geografis Kecamatan Tanjung Palas Timur berada pada wilayah titik koordinat 117°30" - 118°02" bujur timur dan 02°15" - 02°50" lintang utara. Sedangkan topografinya cukup beragam, sebagian besar berbukit-bukit dan bergunung-gunung dengan tebing cukup terjal serta memiliki kemiringan sebagiannya cukup tajam.

Jumlah Desa seluruhnya terdiri 8 Desa, yaitu: Desa Tanah Kuning, Desa Mangkupadi, Desa Sajau Pungit, Desa Wonomulyo, Desa Tanjung Agung, Desa Binai, Desa Pura Sajau, Desa Sajau Hilir.

Adapun Kecamatan Tanjung Palas Timur Merupakan salah satu daerah penghasil ikan (kering/basah), ikan teri, udang dan kelapa

Potensi SDA dan Wisata dari Kecamatan Tanjung Palas Timur meliputi:

- Wisata Alam, meliputi Pemancingan di Danau (Desa Tanjung Agung), sumber air panas (Desa Sajau), dan air terjun (Desa Pura Sajau);
- Wisata Pantai dan Bahari, antara lain : Pantai Tanah Kuning dan Pantai Mangkupadi yang sangat ideal sebagai salah satu lokasi untuk pemancingan ikan laut dan sekitar Karang Tigau untuk diving.
- hutan dengan kayunya, batu bara dan minyak bumi.

5. Tanjung Palas Utara

Kecamatan Tanjung Palas Timur memiliki Luas Wilayah : 806,4 km² dengan Jarak ke ibukota Kabupaten : ± 82 km², Adapun batas wilayah Kecamatan Tanjung Palas Utara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tanjung Palas dan Tanjung Palas Barat;
- Sebelah Utara : Kecamatan Sekatak;
- Sebelah Barat : Kecamatan Peso Hilir.

Wilayah administratif pemerintahan Kecamatan Tanjung Palas Utara membawahi 6 (enam) wilayah pemerintahan desa. Masing-masing mempunyai ciri dan memiliki keanekaragaman struktur budaya masyarakatnya, meliputi : Karang Agung, Pimping, Panca Agung, Ruhui Rahayu, Ardi Mulyo dan Kelubir.

6. Tanjung Palas Barat

Kecamatan Tanjung Palas Barat memiliki Luas Wilayah : 2.779 km² dengan Jarak ke ibukota Kabupaten : ± 82 km², Adapun batas wilayah Kecamatan Tanjung Palas Barat adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Kecamatan Tanjung Palas;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Berau;
- Sebelah Utara : Kecamatan Tanjung Palas Utara;
- Sebelah Barat : Kecamatan Peso Hilir.

Secara geografis wilayah Kecamatan Tanjung Palas Barat terletak pada titik koordinat diantara 117° 04' 00'' – 117 ° 15' 00'' Bujur Timur dan diantara 02° 25' 00'' – 03 ° 10' 00'' Lintang Utara.

Sementara topografi wilayahnya terdiri dari wilayah datar sampai berombak mencapai 57,28 %, berombak sampai berbukit 14,71 % dan berbukit hingga bergunung-gunung mencapai 28,01 %.

Wilayah administratif pemerintahan Kecamatan Tanjung Palas Barat membawahi 5 (lima) wilayah pemerintahan desa. Masing-masing mempunyai ciri dan memiliki keanekaragaman struktur budaya masyarakatnya, meliputi : Long Beluah, Long Sam, Lang Pari, Mara Satu dan Mara Hilir.

Masyarakat Kecamatan ini cukup heterogen, terdiri dari berbagai suku. Suku asli masyarakatnya adalah dayak. Heterogenitas masyarakat ini disebabkan Bhayangkara pernah menjadi pusat kegiatan perusahaan besar. Sehingga berbagai warga berdatangan untuk bekerja dan sekaligus menetap di wilayah ini. Termasuk diantaranya berasimilasi dengan penduduk setempat. Berbagai suku yang ada diantaranya dayak dengan berbagai anak sukunya, banjar, jawa, bugis, tator, minang, batak, timur dan lain-lain.

Heterogenitas ini juga mempengaruhi kehidupan beragama masyarakatnya, yang juga cukup beraneka ragam, seperti Islam, Kristen (protestan dan Katolik), Hindu, dan Budha.

Pendidikan masyarakatnya pun juga cukup berkembang, walaupun yang berasal dari penduduk asli setempat. Meskipun tidak ada sekolahnya, tetapi pada umumnya mereka mengirimkan untuk belajar ke luar daerah.

Komoditi unggulan yang menjadi kekhasan Kecamatan ini adalah Kakao. Berdasarkan struktur tanahnya sangat cocok untuk ditanami dengan tanaman jenis perkebunan ini. Dalam setiap bulannya cukup banyak dihasilkan oleh masyarakat, sebagiannya dijual ke pengumpul untuk kemudian dikirim ke Tawau.

Potensi SDA dan Wisata dari Kecamatan Tanjung Palas Barat meliputi:

- Wisata Alam Air terjun Km 17 dan perburuan
- Wisata Budaya Adat Daya Kenyah.
- Kehutanan, yang masih menyimpan potensi kayu-kayu log;
- Sangat cocok untuk perkebunan, karena hamparan tanah datarnya cukup luas.
- Pertambangan emas yang masih belum tergali.

7. Sekatak

Kecamatan Sekatak memiliki Luas Wilayah : 1.993,98 km² dengan Jarak ke ibukota Kabupaten : ± 93 km², Adapun batas wilayah Kecamatan Sekatak adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Kota Tarakan dan Laut Sulawesi;
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tanjung Palas Utara, Peso Hilir dan Peso;
- Sebelah Utara : Kecamatan Sesayap Hilir dan Sesayap;

- Sebelah Barat : Kabupaten Malinau.

Wilayah administratif pemerintahan Kecamatan Sekatak membawahi 22 (dua puluh dua) wilayah pemerintahan desa. Masing-masing mempunyai ciri dan memiliki keanekaragaman struktur budaya masyarakatnya, meliputi : Pentian, Pungit, Sekatak bengara, Terindak, Anjar Arip, Kelincawan, Kriting, Ambalat, Kendari, Bunau, Sekatak Buji, Liagu, Kelising, Ujang, Tenggiling, Kelembunan, Bekiliu, Paru Abang, Bambang, Turung, Maritam dan Punan Dulau.

8. Bunyu

Kecamatan Bunyu memiliki Luas Wilayah : 198,32 km² dengan Jarak ke ibukota Kabupaten : ± 60 km², Adapun batas wilayah Kecamatan Bunyu adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pulau Tarakan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Baru;

Secara umum wilayah Bunyu terdiri dari daerah datar dan sebagaiannya dataran tinggi dengan tingkat kemiringan sedang. Desa definitif berjumlah 3 Desa, yaitu: Desa Pulau Bunyu Selatan, Desa Pulau Bunyu Barat, dan Desa Pulau Bunyu Timur.

Masyarakat di Bunyu cukup beranekaragam, bagian terbesarnya adalah pendatang yang berasal dari Jawa maupun Sulawesi. Sedangkan suku aslinya adalah masyarakat suku Tidung, dengan klasifikasinya suku Jawa 26,85 %, Bugis 25,11 %, Tidung 11,29 %, Banjar 9,97 % dan suku lainnya 26,78 %.

Dengan keanekaragaman tersebut, maka secara budaya dan adat istiadat pun juga beragam. Masing-masing suku yang ada secara khas menampilkan budayanya masing-masing, seperti Jawa, Bugis, Banjar, Tidung maupun lainnya.

Sebagian masyarakatnya bekerja sebagai tenaga kerja/karyawan di PT Pertamina EP Bunyu dan PT Medco Methanol Bunyu, PNS, petani kebun dan bagian terbesarnya menjadi nelayan.

Potensi SDA dan Wisata dari Kecamatan Bunyu meliputi:

- Salak, ikan (basah dan kering)

- Komoditi olahan hasil pertanian dan perikanan lainnya
- Batu Bara
- Minyak dan gas
- Perikanan dan kelautan
- Pantai Nibung
- Pantai Sei Kura
- Pantai Tanjung Arang

9. Peso Hilir

Kecamatan Peso Hilir memiliki Luas Wilayah : 1.639,71 km² dengan Jarak ke ibukota Kabupaten : ± 225 km², Adapun batas wilayah Kecamatan Peso Hilir adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Kecamatan Tanjung Palas Barat dan Tanjung Palas Utara;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Berau;
- Sebelah Utara : Kecamatan Sekatak;
- Sebelah Barat : Kecamatan Peso;

Wilayah administratif pemerintahan Kecamatan Peso Hilir membawahi 6 (enam) wilayah pemerintahan desa. Masing-masing mempunyai ciri dan memiliki keanekaragaman struktur budaya masyarakatnya, meliputi : Long Telenjau, Naha Aya, Long Bang, Long Bang Hulu, Long Tunggu dan Long Lembu.

10. Peso

Kecamatan Peso memiliki Luas Wilayah : 3.142,79 km² dengan Jarak ke ibukota Kabupaten : ± 250 km², Adapun batas wilayah Kecamatan Peso adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Kecamatan Peso Hilir;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Berau;
- Sebelah Utara : Kabupaten Malinau
- Sebelah Barat : Kabupaten Malinau

Wilayah administratif pemerintahan Kecamatan Peso membawahi 10 (sepuluh) wilayah pemerintahan desa. Masing-masing mempunyai ciri dan memiliki keanekaragaman struktur budaya masyarakatnya, meliputi : Long Peleban, Long

Yiin, Long Buang, Long Lian, Muara Pengian, Long Peso, Long Leju, Lepak Aru, Long Lasan dan Long Bia.

Masyarakat Kecamatan ini cukup heterogen, terdiri dari berbagai suku. Suku asli masyarakatnya adalah dayak. Heterogenitas masyarakat ini disebabkan Bhayangkara pernah menjadi pusat kegiatan perusahaan besar. Sehingga berbagai warga berdatangan untuk bekerja dan sekaligus menetap di wilayah ini. Termasuk diantaranya berasimilasi dengan penduduk setempat. Berbagai suku yang ada diantaranya dayak dengan berbagai anak sukunya, banjar, jawa, bugis, tator, minang, batak, timur dan lain-lain.

Komoditi unggulan yang menjadi kekhasan Kecamatan ini adalah Kakao. Berdasarkan struktur tanahnya sangat cocok untuk ditanami dengan tanaman jenis perkebunan ini. Dalam setiap bulannya cukup banyak dihasilkan oleh masyarakat, sebagiannya dijual ke pengumpul untuk kemudian dikirim ke Tawau.

Potensi SDA dan Wisata dari Kecamatan Peso meliputi:

- Wisata Alam Air terjun Km 17 dan perburuan
- Wisata Budaya Adat Daya Kenyah.
- Kehutanan, yang masih menyimpan potensi kayu-kayu log;
- Sangat cocok untuk perkebunan, karena hamparan tanah datarnya cukup luas.
- Pertambangan emas yang masih belum tergali.

BAB III

KUANTITAS PENDUDUK

A. Persebaran (Distribusi) Penduduk

Kuantitas Penduduk diartikan sebagai jumlah penduduk yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu, yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi (perpindahan penduduk). Bab ini juga akan membahas komposisi penduduk berdasarkan jumlah dan persebaran penduduk serta penduduk menurut karakteristik demografi.

1. Jumlah dan Persebaran Penduduk

Pada akhir semester II 2023 jumlah penduduk Kabupaten Bulungan tercatat 165.775 jiwa. Dari jumlah tersebut terbesar (38,36%) bertempat tinggal di kecamatan/kota Tanjung selor, 12,78% bertempat tinggal di Tanjung Palas Timur dan sisanya bermukim di Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas, Tanjung Palas Tengah, Peso, Peso Hilir, Sekatak dan Kecamatan Bunyu. Jumlah penduduk tercatat terendah (2,59%) bertempat tinggal di Kecamatan Peso Hilir (Lihat Tabel 3.1). Dengan luas 1.639,71 km² kepadatan penduduk Peso Hilir mencapai (2,57 jiwa/km²) terendah kedua setelah kepadatan penduduk Kecamatan Peso (2,7 jiwa/km²) merupakan kepadatan penduduk paling rendah di kabupaten Bulungan. Kepadatan penduduk tertinggi (59,7 jiwa/km²) di kecamatan Bunyu dengan luas wilayah terkecil diantara ke-10 kecamatan-kecamatan di kabupaten Bulungan, Bunyu merupakan wilayah terpisah berbentuk pulau tersendiri yang kaya akan sumber energy terutama minyak bumi dan batubara sehingga banyak penduduk mendiami wilayah yang potensial secara ekonomi tersebut, ini yang menyebabkan kepadatan penduduk tinggi. Dibandingkan dengan kepadatan Kecamatan tanjung Selor (47,92 jiwa/km²) yang merupakan pusat pemerintahan dan kota kabupaten memiliki kepadatan penduduk tertinggi ke-2 setelah Bunyu. Jumlah penduduk perkabupaten/kota yang ada di Kabupaten Bulungan dapat dilihat pada di bawah ini:

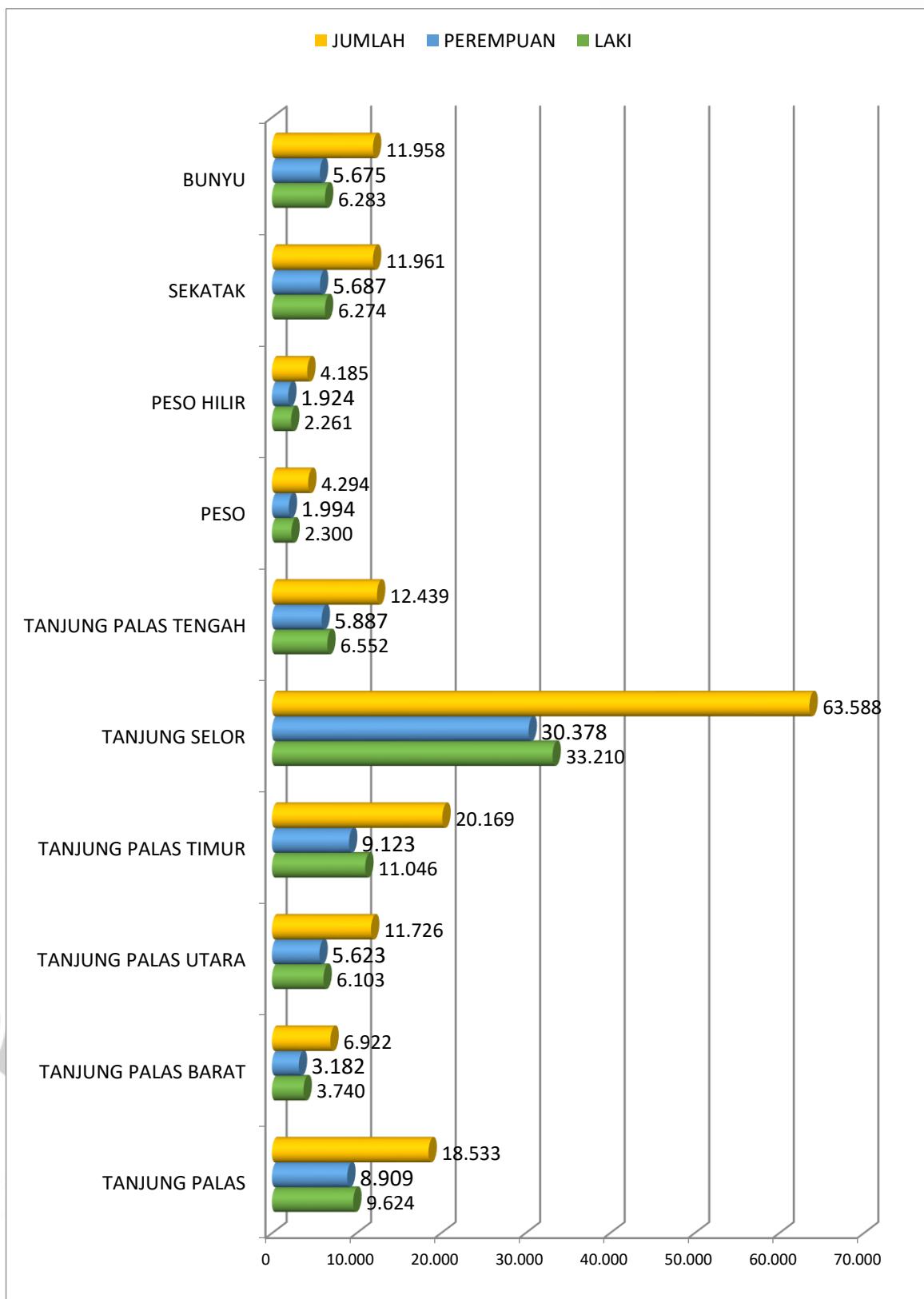
Tabel 3.1: Jumlah Penduduk Per Kecamatan

NO	NAMA KECAMATAN	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TANJUNG PALAS	9.624	8.909	18.533
2	TANJUNG PALAS BARAT	3.740	3.182	6.922
3	TANJUNG PALAS UTARA	6.103	5.623	11.726
4	TANJUNG PALAS TIMUR	11.046	9.123	20.169
5	TANJUNG SELOR	33.210	30.378	63.588
6	TANJUNG PALAS TENGAH	6.552	5.887	12.439
7	PESO	2.300	1.994	4.294
8	PESO HILIR	2.261	1.924	4.185
9	SEKATAK	6.274	5.687	11.961
10	BUNYU	6.283	5.675	11.958
	JUMLAH	87.393	78.382	165.775

Apabila data di atas dituangkan dalam bentuk grafik persebaran penduduk maka dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Grafik 3.1: Jumlah Penduduk per Kecamatan



Adapun jumlah penduduk berdasarkan kelurahan/desa yang ada di Kabupaten Bulungan dan jenis kelamin tahun 2023 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.2: Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Palas

KECAMATAN TANJUNG PALAS				
NO	KELURAHAN / DESA	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TANJUNG PALAS HULU	827	794	1.621
2	TANJUNG PALAS TENGAH	1.263	1.273	2.536
3	TANJUNG PALAS HILIR	2.212	1.919	4.131
4	KARANG ANYAR	683	645	1.328
5	GUNUNG PUTIH	1.722	1.718	3.440
6	PEJALIN	624	559	1.183
7	ANTUTAN	1.295	1.139	2.434
8	TERAS BARU	450	392	842
9	TERAS NAWANG	548	470	1.018

Tabel 3.3: Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Palas Barat

KECAMATAN TANJUNG PALAS BARAT				
NO	KELURAHAN / DESA	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	LONG BELUAH	1.636	1.411	3.047
2	LONG SAM	538	429	967
3	MARA I	845	721	1.566
4	MARA HILIR	433	369	802
5	LONG PARI	288	252	540

Tabel 3.4: Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Palas Utara

KECAMATAN TANJUNG PALAS UTARA				
NO	KELURAHAN / DESA	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	KARANG AGUNG	1.304	1.262	2.566
2	PIMPING	1.230	1.049	2.279
3	PANCA AGUNG	1.313	1.231	2.544
4	RUHUI RAHAYU	1.048	966	2.014
5	ARDI MULYO	387	330	717
6	KELUBIR	821	785	1.606

Tabel 3.5: Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Palas Timur

KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR				
NO	KELURAHAN / DESA	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TANAH KUNING	2.372	1.983	4.355
2	MANGKUPADI	2.128	1.688	3.816
3	SAJAU	1.627	1.273	2.900
4	WONOMULYO	918	797	1.715
5	TANJUNG AGUNG	758	655	1.413
6	BINAI	1.438	1.165	2.603
7	SAJAU HILIR	1.314	1.139	2.453
8	PURA SAJAU	491	423	914

Tabel 3.6: Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Selor

KECAMATAN TANJUNG SELOR				
NO	KELURAHAN / DESA	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TANJUNG SELOR HULU	3.053	2.879	5.932
2	TANJUNG SELOR HILIR	17.707	16.540	34.247
3	TANJUNG SELOR TIMUR	3.493	3.176	6.669
4	JELARAI SELOR	3.904	3.507	7.411
5	GUNUNG SERIANG	584	477	1.061
6	BUMI RAHAYU	911	768	1.679
7	GUNUNG SARI	1.125	888	2.013
8	APUNG	1.811	1.580	3.391
9	TENGGAPAK	622	563	1.185

Tabel 3.7: Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Palas Tengah

KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH				
NO	KELURAHAN / DESA	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	SALIMBATU	3.180	2.891	6.071
2	SILVA RAHAYU	631	620	1.251
3	TANJUNG BUKA	2.741	2.376	5.117

Tabel 3.8: Jumlah Penduduk Kecamatan Peso

KECAMATAN PESO				
NO	KELURAHAN / DESA	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	LEPAK ARU	341	290	631
2	LONG LASAN	263	244	507
3	LONG PESO	365	345	710

4	LONG BIA	268	205	473
5	MUARA PANGEAN	247	224	471
6	LONG LIAN	174	152	326
7	LONG PELAAH	78	66	144
8	LONG LEJUH	229	175	404
9	LONG PELBAN	129	113	242
10	LONG BUANG	206	180	386

Tabel 3.9: Jumlah Penduduk Kecamatan Peso Hilir

KECAMATAN PESO HILIR				
NO	KELURAHAN / DESA	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	LONG TUNGU	539	460	999
2	LONG BANG	432	368	800
3	LONG TELENJAU	312	251	563
4	NAHA AYA	466	414	880
5	LONG LEMBU	225	183	408
6	LONG BANG HULU	287	248	535

Tabel 3.10: Jumlah Penduduk Kecamatan Sekatak

KECAMATAN SEKATAK				
NO	KELURAHAN / DESA	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	SEKATAK BUJI	1.760	1.592	3.352
2	PARU ABANG	224	201	425
3	BUNAU	222	206	428
4	UJANG	230	223	453
5	TENGGILING	199	201	400
6	KELEMBUNAN	233	229	462
7	TURUNG	159	141	300
8	TERINDAK	262	224	486
9	KELISING	196	175	371
10	AMBALAT	151	140	291
11	KERITING	74	67	141
12	KENDARI	93	95	188
13	BAMBANG	97	95	192
14	MARITAM	149	148	297
15	PENTIAN	209	182	391
16	PUNAN DULAU	174	151	325
17	KELINCAUAN	258	230	488
18	BEKILIU	173	155	328

19	SEKATAK BENGARA	593	524	1.117
20	PUNGIT	387	334	721
21	ANJAR ARIP	79	72	151
22	LIAGU	352	302	654

Tabel 3.11: Jumlah Penduduk Kecamatan Bunyu

KECAMATAN BUNYU				
NO	KELURAHAN / DESA	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	BUNYU BARAT	3.189	2.832	6.021
2	BUNYU SELATAN	1.658	1.539	3.197
3	BUNYU TIMUR	1.436	1.304	2.740

2. Kepadatan Penduduk (Population Density Ratio)

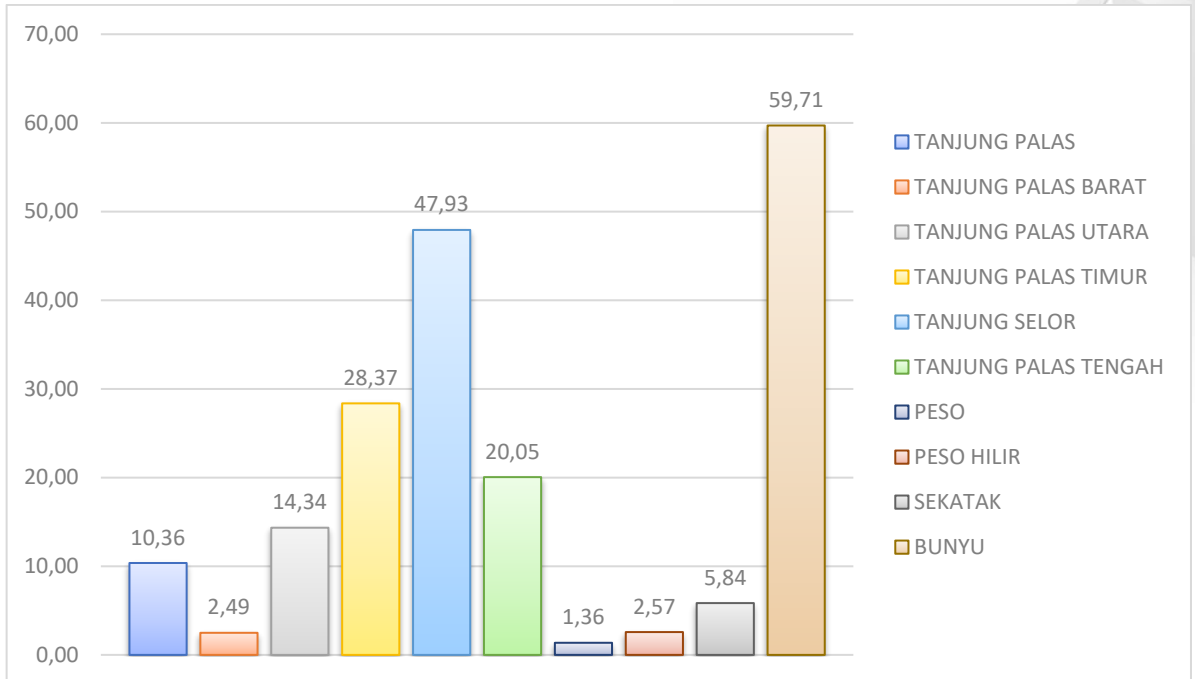
Kepadatan Penduduk adalah perbandingan banyaknya penduduk terhadap luas wilayah suatu daerah. Sedangkan masalah kepadatan penduduk seringkali ikut hadir pada suatu wilayah / daerah yang sedang mengurbanisasi (urbanisasi). Urbanisasi disini tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan penduduk dari desa ke kota, namun juga proses perubahan suatu wilayah yang sebelumnya sepi menjadi ramai dari segi jumlah penduduk dan bertambahnya infrastruktur fisik maupun fasilitas publik. Dengan mengetahui kepadatan penduduk maka dapat diketahui konsentrasi penduduk di suatu wilayah serta dapat digunakan sebagai acuan untuk mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk (Program Transmigrasi).

Secara umum, permasalahan-permasalahan akibat kepadatan penduduk di Indonesia berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, politik, pertahanan, keamanan. Dari segi kuantitas, jumlah penduduk yang besar berarti permasalahan dalam kemampuan menyediakan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan dari segi kualitas terlihat dari kemampuan dan daya saing Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Luas wilayah Kabupaten Bulungan tercatat seluas 18.010 Km². Sebaran penduduk umumnya terkonsentrasi di pusat-pusat perkotaan. Kawasan permukiman yang cukup padat berada di Kecamatan Tanjung Selor, diikuti Kecamatan Tanjung Palas, dan Kecamatan yang lain. Data kepadatan penduduk Kabupaten Bulungan

dapat dilihat pada rasio kepadatan penduduk dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik 3.2: Rasio Kepadatan Penduduk per Kecamatan (perjiwa/kilometer persegi)



3. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah rata-rata laju pertumbuhan penduduk di suatu daerah selama periode waktu tertentu, sehingga dapat diketahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu. Laju pertumbuhan penduduk adalah salah satu indikator yang paling sering digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi kependudukan suatu daerah di masa kini maupun di masa depan. Secara umum pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh faktor alami yaitu kelahiran dan kematian, dan faktor non alami yaitu migrasi (perpindahan penduduk). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Bulungan adalah 153.588 jiwa dan jumlah penduduk di tahun 2021 adalah 161.573 jiwa. Dengan demikian perubahan jumlah penduduk yang berasal dari kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk adalah 5.106 jiwa dan pertumbuhan penduduk sebesar **3,32%**. Berikut pertumbuhan

penduduk Kabupaten Bulungan tahun 2019-2023 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.12: Pertumbuhan Penduduk Kabputaen Bulungan Tahun 2019-2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK					PERTUMBUHAN PENDUDUK RATA-RATA
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	TANJUNG PALAS	16.829	17.509	17.802	18.187	18.533	2,16
2	TANJUNG PALAS BARAT	6.440	6.549	6.788	6.918	6.922	1,92
3	TANJUNG PALAS UTARA	10.405	10.997	11.326	11.559	11.726	2,06
4	TANJUNG PALAS TIMUR	14.527	15.874	17.253	19.204	20.169	11,31
5	TANJUNG SELOR	52.432	55.645	57.861	61.203	63.588	5,78
6	TANJUNG PALAS TENGAH	10.812	12.032	12.192	12.530	12.439	2,77
7	PESO	4.033	4.155	4.204	4.287	4.294	1,97
8	PESO HILIR	3.832	3.940	4.143	4.216	4.185	1,76
9	SEKATAK	8.928	10.040	10.366	11.647	11.961	12,36
10	BUNYU	11.495	11.711	11.623	11.822	11.958	1,71
	JUMLAH	139.733	148.452	153.558	161.573	165.775	5,22

Dari tabel diatas terlihat bahwa laju pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bulungan tahun 2023 adalah 5,52%. Laju pertumbuhan paling tinggi di peroleh dari Kecamatan Tanjung Palas Timur sebesar 11,31%, sedangkan laju pertumbuhan paling kecil terdapat pada 3 (tiga) kecamatan yaitu Tanjung Palas Barat, Peso Hilir, dan Bunyu.

B. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

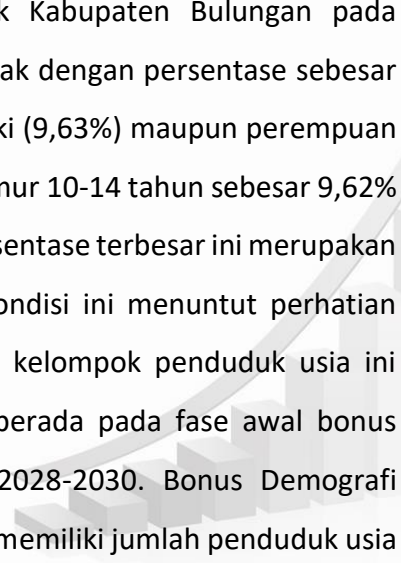
Demografi adalah ilmu kependudukan yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis demografi merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu. Indikator penduduk menurut karakter demografi dapat dilihat dari usia dan jenis kelamin, status perkawinan, keluarga, pendidikan, agama, kecacatan, kelahiran dan kematian.

1. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis kelamin

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih, dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Penduduk menurut kelompok umur merupakan penduduk yang dikelompokkan menurut kelompok umur 5 tahunan. Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan pekerjaan dan lain-lain. Setiap kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, misalnya kelompok bayi dan balita, mereka lebih membutuhkan asupan gizi yang baik dan perawatan kesehatan. Data penduduk ini juga sangat vital jika dikaitkan dengan program-program yang digalakkan pemerintah. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin tergambar dalam table halaman selanjutnya:

Tabel 3.13: Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN				JUMLAH	
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		PENDUDUK	
	n	%	n	%	n	%
0-4	7.206	8,25	6.679	8,48	13.885	8,38
5-9	8.413	9,63	7.683	9,76	16.096	9,71
10-14	8.247	9,44	7.707	9,79	15.954	9,62
15-19	7.083	8,10	6.383	8,11	13.466	8,12
20-24	7.959	9,11	7.001	8,89	14.960	9,02
25-29	7.233	8,28	6.466	8,21	13.699	8,26
30-34	6.631	7,59	6.232	7,92	12.863	7,76
35-39	6.542	7,49	6.162	7,83	12.704	7,66
40-44	6.985	7,99	6.157	7,82	13.142	7,93
45-49	5.869	6,72	5.054	6,42	10.923	6,59
50-54	5.062	5,79	4.263	5,41	9.325	5,63
55-59	3.744	4,28	3.060	3,89	6.804	4,10
60-64	2.546	2,91	2.152	2,73	4.698	2,83
65-69	1.734	1,98	1.471	1,87	3.205	1,93
70-74	1.099	1,26	860	1,09	1.959	1,18
75+	1.040	1,19	1.052	1,34	2.092	1,26
TOTAL	87.393	100,00	78.382	99,56	165.775	100,00



Tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Bulungan pada kelompok umur 5-9 tahun merupakan jumlah terbanyak dengan persentase sebesar 9,71% dan ini ada pada kelompok jenis kelamin laki-laki (9,63%) maupun perempuan (9,76%). Penduduk terbanyak kedua pada kelompok umur 10-14 tahun sebesar 9,62% dari jumlah penduduk Kabupaten Bulungan. Kedua persentase terbesar ini merupakan usia sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama. Kondisi ini menuntut perhatian pemerintah Kabupaten Bulungan dalam penanganan kelompok penduduk usia ini karena menurut prediksi saat ini Indonesia sedang berada pada fase awal bonus demografi dimana puncaknya berada pada tahun 2028-2030. Bonus Demografi merupakan kondisi dimana suatu wilayah atau negara memiliki jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan dengan usia non-produktif.

Prasyarat yang harus dipenuhi oleh suatu negara apabila ingin memperoleh manfaat besar bonus demografi yaitu sumber daya manusia yang berkualitas. Karena dengan adanya masyarakat yang berkualitas dapat meningkatkan pendapatan perkapita suatu negara apabila ada kesempatan kerja yang produktif. Kedua, terserapnya tenaga kerja menjadi faktor penting dalam memanfaatkan bonus demografi karena dengan banyak dibutuhkannya tenaga kerja, maka pengangguran akan berkurang dan kesejahteraan akan meningkat pesat. Ketiga, meningkatkan tabungan di tingkat rumah tangga. Setiap rumah tangga memiliki potensi untuk membuka suatu usaha yang akan memberi lapangan pekerjaan untuk orang lain sehingga angka pengangguran menurun. Terakhir, peran perempuan yang masuk ke dalam pasar kerja akan membantu peningkatan pendapatan dan akan lebih banyak lagi penduduk usia produktif menjadi benar-benar produktif.

2. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk pria dan jumlah penduduk wanita pada suatu daerah pada suatu waktu tertentu, yang dinyatakan dalam berapa banyaknya penduduk pria berbanding 100 orang wanita. Jika sex ratio diatas 100 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, sedangkan bila sex rasionya kurang dari 100 berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki.

Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan sumber daya manusia laki-laki dan perempuan secara adil. Informasi tentang rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh masyarakat termasuk institusi partai politik, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen/legislatif.

Komposisi jumlah penduduk yang berimbang dan partisipasi aktif laki-laki dan perempuan dalam setiap proses pembangunan akan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan. Dari rasio jenis kelamin ini, diharapkan penentu kebijakan di level pusat dan daerah dapat membuat legislasi secara adil dan tidak bias gender. Dengan jumlah penduduk yang hampir berimbang antara laki-laki dan perempuan, maka sangat dibutuhkan peran aktif kedua belah pihak di berbagai bidang pembangunan, sehingga dapat dirasakan kesetaraan gender yang pada akhirnya akan mewujudkan tujuan pembangunan yang adil dan makmur. Data penduduk berdasarkan kelompok umur dan rasio jenis kelamin (sex ratio) Kabupaten Bulungan selengkapnya pada tabel berikut :

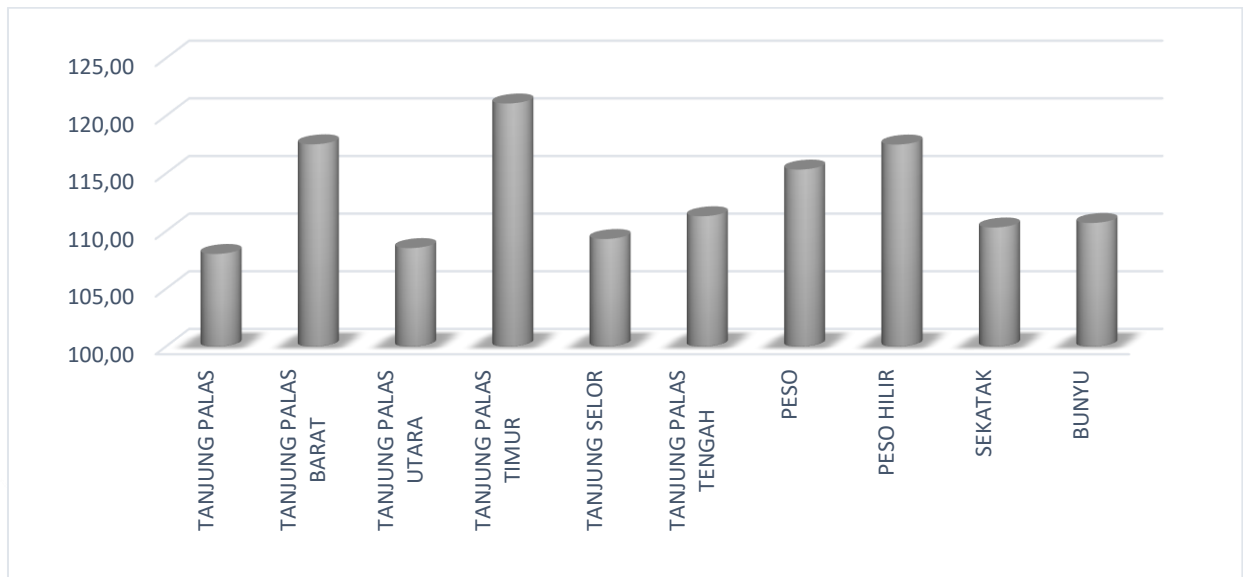
Tabel 3.14: Jumlah Penduduk berdasarkan rasio jenis kelamin

NO	KECAMATAN	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	RASIO (%)
1	TANJUNG PALAS	9.624	8.909	18.533	108,03
2	TANJUNG PALAS BARAT	3.740	3.182	6.922	117,54
3	TANJUNG PALAS UTARA	6.103	5.623	11.726	108,54
4	TANJUNG PALAS TIMUR	11.046	9.123	20.169	121,08
5	TANJUNG SELOR	33.210	30.378	63.588	109,32
6	TANJUNG PALAS TENGAH	6.552	5.887	12.439	111,30
7	PESO	2.300	1.994	4.294	115,35
8	PESO HILIR	2.261	1.924	4.185	117,52
9	SEKATAK	6.274	5.687	11.961	110,32
10	BUNYU	6.283	5.675	11.958	110,71
	JUMLAH	87.393	78.382	165.775	111,50

Dari tabel di atas nampak bahwa Rasio Jenis Kelamin (RJK) atau Sex Ratio di Kabupaten Bulungan adalah 111,5 yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk

perempuan terdapat 111 orang penduduk laki-laki. Jika dilihat per kabupaten/kota pada tabel, terlihat bahwa rasio jenis kelamin (sex ratio) di setiap Kabupaten/Kota di atas 100, hal ini berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki di setiap Kecamatan lebih banyak daripada perempuan. Jika diamati masing-masing wilayah Kecamatan, maka terlihat bahwa Kecamatan Tanjung Palas Timur memiliki rasio jenis kelamin tertinggi yaitu 121,08 diikuti Kecamatan Tanjung Palas Barat sebesar 117,54; Kecamatan Peso Hilir sebesar 117,52; Kecamatan Peso sebesar 115,35; sedangkan rasio jenis kelamin terendah adalah Kecamatan Tanjung Palas sebesar 108,03. Apabila data rasio jenis kelamin ini disajikan dalam bentuk grafik, maka akan terlihat seperti di halaman berikut:

Grafik 3.3: rasio jenis kelamin



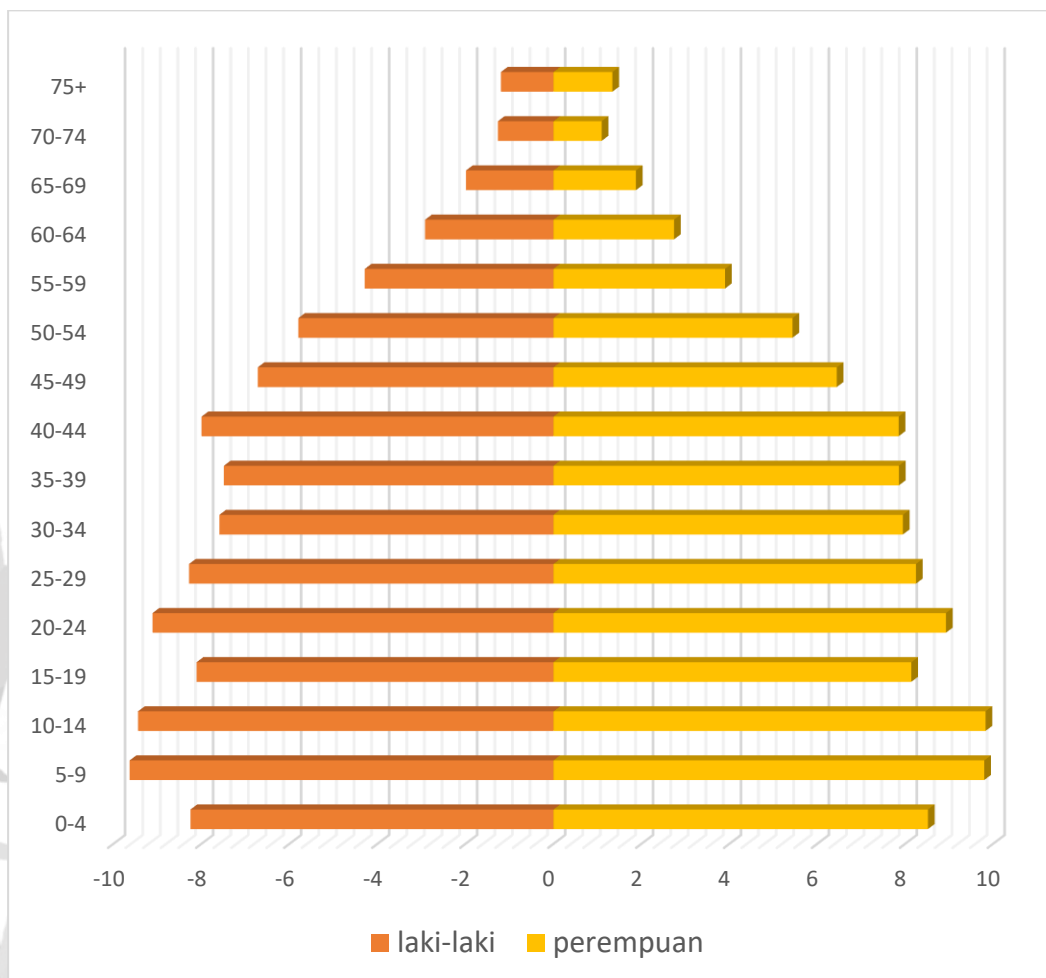
3. Piramida Penduduk

Piramida Penduduk adalah grafik mendatar atau diagram batang yang menyajikan data penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin dan daerah suatu penduduk. Piramida penduduk disajikan dalam dua buah grafik batang, pada satu sisi menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan pada sisi lainnya menunjukkan jumlah penduduk perempuan dalam kelompok interval usia penduduk lima tahunan. Untuk laki-laki digambarkan di sisi kanan dan untuk perempuan di sisi kiri. Piramida penduduk ini mengandung beberapa informasi, yaitu:

- 1) Jumlah angka kelahiran semakin bertumbuh sehingga jumlah penduduk juga bertambah;
- 2) Rasio perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan;
- 3) Penggolongan penduduk berdasarkan usia secara berkala;
- 4) Jumlah usia produktif dan non-produktif;
- 5) Jumlah lapangan kerja yang dibutuhkan;
- 6) Kebutuhan infrastruktur pendidikan untuk penduduk;
- 7) Perkiraan jumlah kelahiran di masa depan;
- 8) Perkiraan jumlah kematian yang akan terjadi, dsb.

Berikut gambaran piramida penduduk Kabupaten Bulungan berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin :

Tabel 3.4: Grafik Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur



Piramida penduduk Kabupaten Bulungan tahun 2023 berdasarkan komposisi penduduk umur dan jenis kelamin menunjukkan ciri Expansive yang artinya sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda dan umur produktif dibandingkan kelompok umur di atasnya dan Rapid Growth yang artinya persentase penduduk umur muda yang besar. Pada piramida penduduk di atas, terlihat bahwa jumlah penduduk kelompok umur 0-4 tahun yang terletak pada dasar piramida lebih kecil dari kelompok umur di atasnya yang berarti usia 0-4 tahun atau balita lebih sedikit daripada usia 5-9 tahun, dst. Jumlah terbesar adalah penduduk 5-9 tahun, yang berarti dibutuhkan perhatian lebih untuk mengakomodir pemenuhan segala kebutuhan penduduk kelompok umur ini contohnya penyediaan sekolah dasar di sektor pendidikan.

Selanjutnya ukuran untuk menyatakan "tua-muda" suatu penduduk dapat dilihat dari umur median penduduk tersebut. Umur median adalah umur yang membagi jumlah penduduk tepat menjadi dua bagian yang sama jumlahnya, bagian yang pertama lebih muda dan bagian yang kedua lebih tua daripada umur median. Umur median digunakan untuk mengukur tingkat pemusatan penduduk pada kelompok-kelompok umur tertentu. Penduduk Kabupaten Bulungan termasuk dalam kategori penduduk Intermediate. Setelah dihitung umur median penduduk Kabupaten Bulungan tahun 2023 adalah 29,45 tahun, yang berarti setengah penduduk Kabupaten Bulungan pada tahun 2023 berusia di bawah 29 tahun dan setengahnya lagi berusia lebih tua dari 29. Dengan kata lain, penduduk Kabupaten Bulungan dikategorikan sebagai penduduk dewasa.

4. Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)

Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator kasar yang menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif (umur 15-64 tahun) dan usia non-produktif (umur 0-14 tahun ditambah umur 65 tahun ke atas). Rasio ini digunakan untuk melihat seberapa besar beban tanggungan yang harus ditanggung oleh penduduk produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Semakin tinggi

persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk non-produktif. Sebaliknya semakin rendah rasio ketergantungan, maka semakin rendah pula beban kelompok produktif untuk menanggung penduduk usia belum produktif dan atau tidak produktif. Data kependudukan menurut kelompok produktif dan jenis kelamin Kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15: Tabel Rasio Ketergantungan

Kelompok Umur	laki-laki		perempuan		Total	
	jumlah	%	jumlah	%	jumlah	%
<14	23.866	27,31	22.069	28,16	45.935	27,71
15-64	59.654	68,26	52.930	67,53	112.584	67,91
>65	3.873	4,43	3.383	4,32	7.256	4,38
Jumlah	87.393	100,00	78.382	100,00	165.775	100,00

Jika melihat tabel di atas dapat dianalisa bahwa hampir tiga perempatnya merupakan penduduk usia produktif yaitu pada kelompok umur 15-64 tahun yang berjumlah 112.584 jiwa (67,91 %). Demikian pula dengan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, nampak bahwa penduduk laki-laki dan perempuan yang terbesar berada pada kelompok umur 15-64 tahun. Kondisi ini sangat menguntungkan karena sebagian besar penduduk merupakan penduduk usia kerja (usia produktif) yang berpotensi sebagai modal pembangunan dan sisanya sebanyak 45.935 jiwa (27,71 %) merupakan penduduk usia muda (berusia dibawah 15 tahun) serta 7.256 jiwa (4,38%) merupakan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas).

Penduduk usia kurang dari 15 tahun harus mendapat perhatian karena 5 tahun mendatang kelompok ini akan menjadi tenaga kerja baru yang memerlukan skill dan kualitas SDM yang memadai. Karena itu diperlukan dukungan sektor pendidikan atau pelatihan dengan fasilitas yang baik serta lingkungan yang mendukung serta menyebar di seluruh wilayah Kecamatan. Sehingga ketika mereka memasuki dunia kerja, mampu menjadi tenaga kerja yang profesional. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten sejak dini harus mendorong sebuah kebijakan agar masyarakat mampu mendapatkan asupan gizi yang baik, sarana prasarana pendidikan yang memadai serta lingkungan yang ramah anak, baik di rumah di sekolah maupun di tempat umum,

menciptakan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak dan lebih berkualitas. Jika melihat struktur umur penduduk Kabupaten Bulungan maka rasio ketergantungannya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$DR = \frac{\text{Jumlah usia nonproduktif}}{\text{Usia produktif}} \times 100$$

$$DR = \frac{45.935 + 7.256}{112.584} \times 100$$

$$= 47,24$$

Hitungan diatas menunjukkan rasio ketergantungan Kabupaten Bulungan tahun 2023 sebesar 47,24 Angka ini menunjukkan dari 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kabupaten Bulungan mempunyai tanggungan sekitar 31 penduduk usia non produktif.

5. Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin

Jumlah penduduk jika dilihat menurut status perkawinan per Kepala Keluarga dapat dilihat pada tabel di bawah:

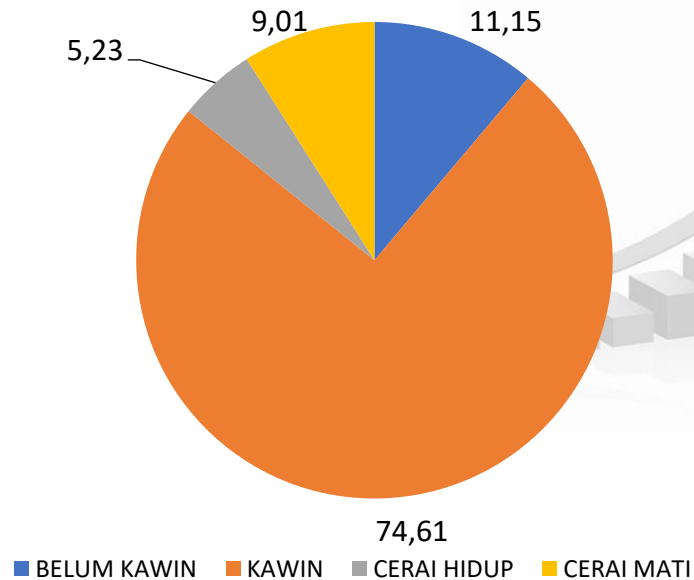
Tabel 3.16: Tabel Rasio Status Perkawinan

STATUS KAWIN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	PRESENTASE
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
BELUM KAWIN	4.463	1.349	5.812	11,15
KAWIN	36.817	2.081	38.898	74,61
CERAI HIDUP	1.314	1.415	2.729	5,23
CERAI MATI	1.066	3.630	4.696	9,01
TOTAL	43.660	8.475	52.135	100,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Bulungan didominasi penduduk berstatus Kawin sebanyak 50,51%. Jika dilihat menurut Jenis kelamin terlihat bahwa proporsi penduduk laki-laki yang belum kawin lebih besar dibandingkan dengan penduduk perempuan yang belum kawin. Hal ini dapat disebabkan karena laki-laki cenderung meneruskan pendidikan dan / atau baru mulai bekerja untuk dapat membiayai pernikahannya sehingga menunda perkawinan dan juga dapat disebabkan laki-laki yang nantinya akan menjadi kepala rumah tangga berkeinginan untuk hidup mapan secara ekonomi sebelum memasuki kehidupan

berumah tangga demi memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram dibawah ini :

Grafik 3.5: Rasio Status Perkawinan



Proporsi penduduk dengan status cerai hidup dan cerai mati lebih tinggi pada perempuan dibandingkan penduduk laki-laki. Pada beberapa kasus hal ini dapat disebabkan karena perempuan memiliki lebih banyak pertimbangan untuk menikah kembali khususnya pada perempuan yang mandiri secara ekonomi sehingga menunda perkawinan kembali, dapat pula disebabkan masih adanya trauma dari perkawinan sebelumnya.

C. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

1. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang diselesaikan semakin baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Namun ukuran ini masih harus ditambah dengan etos kerja dan keterampilan baik hard skill maupun soft skill. Beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa yang dibutuhkan tidak saja keterampilan tetapi juga attitude (sikap perilaku/kepribadian), karena kepribadian dapat mencerminkan etos kerja dan untuk meningkatkan kepribadian membutuhkan waktu yang relatif lama, sedangkan keterampilan dapat ditingkatkan melalui bimbingan dan pelatihan.

Tamat belajar/pendidikan didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil diselesaikan oleh seseorang dengan dibuktikan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar. Jenjang pendidikan tertinggi merupakan jenjang atau kelas pendidikan tertinggi yang pernah diselesaikan oleh seseorang. Pemerintah Kabupaten Bulungan perlu memperhatikan kondisi saat ini mengingat bahwa era revolusi industri 4.0 telah berlangsung dan persaingan yang ketat untuk memperoleh pekerjaan di Indonesia.

Perlunya peningkatan pendidikan misalnya program 1 Sarjana 1 KK untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan eksplorasi terhadap pekerjaan baik menciptakan lapangan pekerjaan maupun sebagai tenaga kerja yang berkualitas, penilaian terhadap kemampuan diri yang dikaitkan dengan masalah pekerjaan, perencanaan pekerjaan, pengambilan keputusan dalam pemilihan pekerjaan. Peningkatan akses kependidikan yang merata terutama untuk penduduk perbatasan, 3T (tertinggal, terpencil, terluar) serta ekonomi menengah kebawah perlu dilakukan mengingat bahwa sebagian besar peluang kerja membutuhkan tenaga terdidik yang memiliki keterampilan khusus. Untuk data penduduk menurut pendidikan dan jenis kelamin di Kabupaten Bulungan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.17: Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir

PENDIDIKAN	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	n	%	n	%	n	%
BELUM SEKOLAH	6.943	11,64	6.348	11,99	13.291	11,81
TIDAK TAMAT SD	8.569	14,36	7.376	13,94	15.945	14,16
TAMAT SD	12.568	21,07	11.592	21,90	24.160	21,46
SLTP	9.288	15,57	8.759	16,55	18.047	16,03
SLTA	16.087	26,97	12.175	23,00	28.262	25,10
DIPLOMA 2	294	0,49	355	0,67	649	0,58
DIPLOMA 3	817	1,37	1.458	2,75	2.275	2,02
STRATA 1	4.717	7,91	4.708	8,89	9.425	8,37
STRATA 2	365	0,61	158	0,30	523	0,46
STRATA 3	6	0,01	1	0,00	7	0,01
JUMLAH	59.654	100	52.930	100	112.584	100

Dengan melihat jumlah komposisi penduduk yang memiliki pendidikan SLTA / Sederajat keatas tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat perekonomian dan kesejahteraan karena pendidikan formal yang ditamatkan cukup berpengaruh

terhadap penghasilan yang diperoleh. Artinya, penduduk yang tingkat pendidikannya rendah tidak akan terserap oleh pasar tenaga kerja, akan menjadi pengangguran, sehingga menambah pula jumlah penduduk miskin. Keterkaitan tingkat pendidikan dengan kemiskinan sangat besar, karena pendidikan memberikan kesempatan terhadap individu untuk berkembang melalui ilmu pengetahuan dan keterampilan. Kemiskinan muncul karena sumber daya manusia yang rendah, dan kemiskinan juga menghalangi seseorang untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi.

2. Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan

Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, dan dalam Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 dinyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya”, memberikan jaminan kepada seluruh warga negaranya untuk melaksanakan ibadah atau ritual agamanya. Agama di sini meliputi seluruh sistem kepercayaan, baik agama-agama samawi monotheis, polytheis, maupun agama-agama yang bersumber dari adat istiadat atau kepercayaan leluhur.

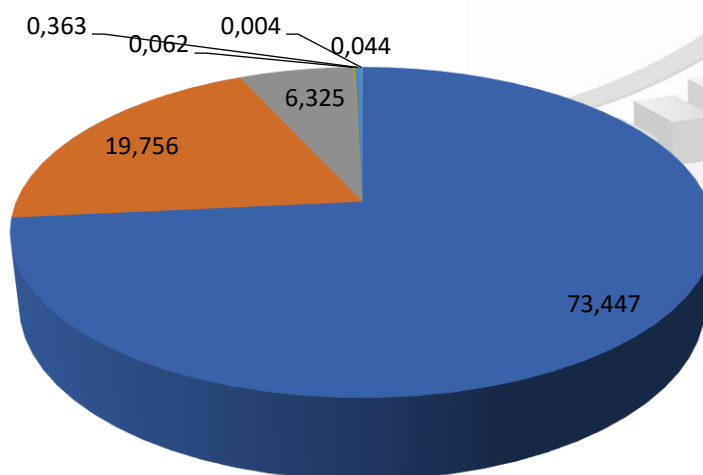
Kemudian dalam hal kebijakan bidang keberagamaan, data penduduk berdasarkan agama yang dianut dapat menjadi acuan pemerintah untuk mengambil kebijakan terkait dengan kebebasan dan toleransi kehidupan beragama, dan perencanaan sarana dan prasarana peribadatan. Data agama penduduk dibagi tiap jenis kelamin dan setiap kabupaten/kota di Kabupaten Bulungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.18: Jumlah Pemeluk Agama/Kepercayaan

AGAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PRESENTASE (%)
ISLAM	63.870	57.887	121.757	73,447
KRISTEN	17.515	15.235	32.750	19,756
KATHOLIK	5.603	4.882	10.485	6,325
HINDU	63	40	103	0,062
BUDHA	302	299	601	0,363
KONGHUCU	2	4	6	0,004
KEPERCAYAAN	38	35	73	0,044

Dilihat dari tabel diatas penduduk Kabupaten Bulungan didominasi pemeluk agama Islam sebesar 165.775 jiwa (73,44%) disusul kemudian pemeluk agama Kristen sebesar 32.756 jiwa (19,75%) dan Katholik 10.485 jiwa (6,32%) sedangkan Hindu, Budha dan Konghucu serta aliran Kepercayaan masih sangat sedikit dibawah 1%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut :

Grafik 3.6: Jumlah Pemeluk Agama / Kepercayaan



■ ISLAM ■ KRISTEN ■ KATHOLIK ■ HINDU ■ BUDHA ■ KONGHUCU ■ KEPERCAYAAN

3. Jumlah Rata-Rata Anggota Keluarga

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 1988, mendefinisikan keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul, serta tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Definisi ini digunakan pada pengajaran di sekolah-sekolah, seperti yang terdapat pada salah satu modul pengajaran sosiologi yang menjelaskan bahwa keluarga adalah kelompok sosial terkecil dalam masyarakat, yang terdiri dari orang tua (ayah dan ibu) serta anak. Modul tersebut juga menyebutkan bahwa setiap anggota dalam keluarga memiliki peranan yang berbeda. Pada masa lampau, peran ayah seringkali diasosiasikan sebagai pencari nafkah utama. Sementara itu, ibu mengurus semua kebutuhan di rumah, seperti memasak, membersihkan rumah, dan mengasuh anak namun mereka adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pendefinisian keluarga oleh pemerintah pada masa itu tentunya disesuaikan dengan kondisi riil yang banyak ditemui di masyarakat. Pada akhir tahun 1980-an, keluarga ideal adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, nenek, kakek, paman, bibi, dan anak. Tiap anggota keluarga tersebut memiliki peran yang berbeda-beda namun saling melengkapi. Situasi tersebut menunjukkan bagaimana pemerintah memiliki kontrol yang kuat terhadap masyarakat pada masa itu, baik melalui media maupun pendidikan. Hal ini tidak mengherankan sebab pembatasan jumlah anak menjadi salah satu prioritas pembangunan utama oleh pemerintah masa itu. Sebagai konsekuensinya, definisi keluarga pun mengikuti arah pembangunan tersebut.

Definisi lain dari keluarga adalah ia merupakan unit terkecil dari masyarakat dalam sistem sosial sebagai tempat untuk belajar bersosialisasi, artinya proses belajar bagi individu menempatkan diri dalam masyarakat dan kelompok sosialnya. Keluarga merupakan embrio atau miniatur berbagai unsur sistem sosial manusia. Oleh karena itu, kondisi keluarga dapat mempengaruhi kualitas sebuah masyarakat. Dalam UU Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga disebutkan bahwa pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Unit keluarga menjadi hal penting untuk berbagai intervensi seperti penanganan kemiskinan, keluarga berencana, kesehatan dan lain sebagainya.

Keluarga terbagi menjadi dua yaitu keluarga inti/batih (nuclear family) dan keluarga luas (extended family). Nuclear family adalah keluarga inti atau keluarga dasar yaitu istilah yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah keluarga, kelompok yang terdiri dari sepasang orang dewasa dan anak-anak mereka. Extended family adalah keluarga diluar keluarga inti, yang terdiri dari kakek-nenek, bibi, paman, dan sepupu semua yang tinggal didekatnya atau di rumah yang sama. Besarnya jumlah anggota keluarga dapat digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan keluarga, dimana semakin kecil jumlah anggota keluarga relatif diasumsikan akan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya namun setiap keluarga berbeda-beda.

Jika melihat realitas sosial saat ini, beberapa definisi keluarga di atas, ada yang masih relevan dan ada pula yang sudah tidak relevan lagi. Persyaratan yang masih relevan adalah adanya syarat perkawinan, hubungan darah, atau pun adopsi. Syarat lain yang masih relevan adalah fungsi keluarga sebagai penerus kebudayaan. Hal ini tercermin dalam pengalaman sehari-hari ketika generasi muda lebih banyak belajar dari keluarga mengenai masakan, bahasa, silsilah keluarga, ataupun cara berinteraksi dibandingkan dari pihak lain selain keluarga. Ikatan kekeluargaan yang masih sangat kuat di Indonesia menjadi dasar argumen relevansi syarat ini.

Dengan kondisi seperti diuraikan di atas, kepemilikan Kartu Keluarga (KK) menjadi sangat penting. KK merupakan kartu identitas bagi sebuah keluarga yang memuat berbagai data penting, seperti nama, susunan anggota keluarga, hubungan, pekerjaan setiap anggota keluarga, dan berbagai informasi penting lainnya. Dalam penggunaannya, kartu keluarga akan sering dipakai sebagai salah satu persyaratan utama dalam pengurusan administrasi dan juga berbagai dokumen penting. Misalnya, pembuatan akta kelahiran bagi anak, pendaftaran anak masuk sekolah, penggantian KTP, dan berbagai urusan perbankan juga akan membutuhkan kartu keluarga sebagai persyaratannya.

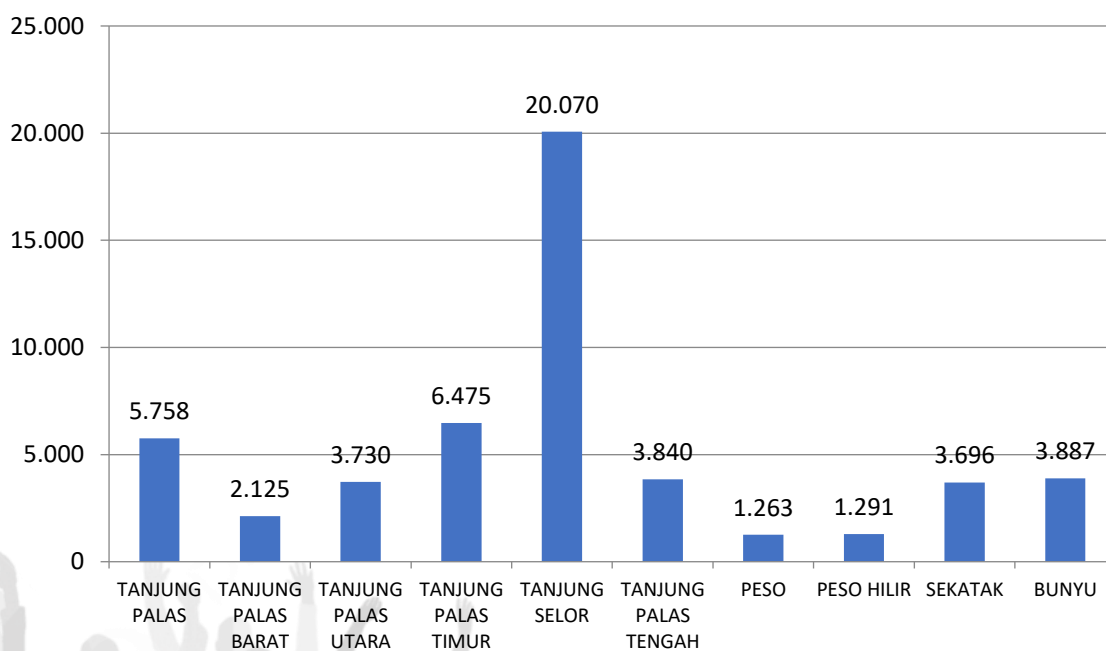
Tabel 3.19: Jumlah Rata-rata Keluarga

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	PENDUDUK	RATA – RATA JUMLAH ANGGOTA KELUARGA
1	TANJUNG PALAS	5.758	18.533	3,22
2	TANJUNG PALAS BARAT	2.125	6.922	3,26
3	TANJUNG PALAS UTARA	3.730	11.726	3,14
4	TANJUNG PALAS TIMUR	6.475	20.169	3,11
5	TANJUNG SELOR	20.070	63.588	3,17
6	TANJUNG PALAS TENGAH	3.840	12.439	3,24
7	PESO	1.263	4.294	3,40
8	PESO HILIR	1.291	4.185	3,24
9	SEKATAK	3.696	11.961	3,24
10	BUNYU	3.887	11.958	3,08
	JUMLAH	52.135	165.775	3,18

Dilihat dari tabel di atas jumlah keluarga di Kabupaten Bulungan sebanyak 46.550 keluarga yang tersebar di 10 Kecamatan. Kecamatan Tanjung Selor sebesar 17.802 keluarga, selanjutnya Kecamatan Tanjung Palas memiliki 5.375 keluarga, dan selanjutnya Kecamatan Tanjung Palas Timur sebanyak 5.198 keluarga dan jumlah keluarga terkecil berada di Kecamatan Peso Hilir yaitu 1.230 keluarga.

Sedangkan rata-rata jumlah anggota keluarga di Kabupaten Bulungan sebesar 3,3%. Kecamatan Peso memiliki rata-rata jumlah anggota keluarga tertinggi sebesar 3,57% disusul Kecamatan Sekatak sebesar 3,44%, Kecamatan Tanjung Palas Barat 3,34% dan terkecil Kecamatan Bumyu sebesar 3,19%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Grafikl 3.7: Jumlah Kepala Keluarga



Informasi tentang rata-rata jumlah anggota keluarga ini dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan program keluarga berencana di wilayah Kabupaten Bulungan dan dapat digunakan di Kecamatan dalam merencanakan kebutuhan perumahan, seperti untuk menentukan ukuran rumah dengan berbagai tipe agar dapat memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat yang keluarganya beranggotakan 4 orang.

BAB IV

KUALITAS PENDUDUK

Kualitas Penduduk merupakan kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak. Aspek-aspek tersebut merupakan Indikator Pembangunan Manusia (Human Development Index) dalam pemenuhan kesejahteraan. Kualitas Pendidikan penduduk dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang dihitung dari angka melek aksara/huruf dan jenjang pendidikan yang telah ditempuh, aspek kesehatan dihitung dari angka kematian bayi dan angka harapan hidup waktu lahir; dan aspek kesejahteraan dihitung dari penghasilan per kapita.

Permasalahan kualitas kependudukan di Indonesia masih berakibat pada soal sumber daya manusianya, karena rendahnya tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, hingga berakibat pada rendahnya kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya. BKKBN menyebutkan beberapa masalah kependudukan di Indonesia, yaitu:

1. Jumlah penduduk besar tetapi kualitas relatif rendah;
2. Laju pertumbuhan penduduk tinggi;
3. Fertilitas relatif tinggi dengan penyebaran yang tidak merata;
4. Angka kematian ibu dan anak tinggi, sedangkan angka harapan hidup relatif rendah;
5. Persebaran penduduk yang tidak merata.

A. Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor terpenting yang dapat mempengaruhi kinerja dan produktivitas seseorang. Tinggi rendahnya tingkat kesehatan penduduk suatu daerah salah satunya dapat dilihat dari besarnya angka kematian bayi dan ibu saat melahirkan. Semakin rendah angka kematian bayi dan ibu saat melahirkan, berarti semakin baik tingkat kesehatan penduduk.

Rendahnya tingkat kesehatan suatu daerah, antara lain disebabkan oleh banyaknya lingkungan yang kotor dan sanitasi yang buruk, dan terbatasnya akses layanan kesehatan. Untuk meningkatkan tingkat kesehatan penduduk, pemerintah melakukan berbagai upaya di antaranya melaksanakan program perbaikan gizi khususnya untuk anak-anak balita, peningkatan kesadaran penduduk untuk berperilaku hidup sehat, penambahan sarana dan prasarana kesehatan juga diperlukan untuk meratakan pelayanan kesehatan di seluruh lapisan masyarakat, program penyediaan air bersih dan perbaikan sanitasi lingkungan, berupa pembangunan jamban keluarga, pembuatan sumur, penyediaan tempat pembuangan sampah, dan lain sebagainya.

Berikut ini adalah beberapa indikator untuk melihat kualitas penduduk :

1. **ASFR (Age Specific Fertility Rate)**

Age Specific Fertility Rate atau angka kelahiran menurut umur adalah banyaknya kelahiran selama setahun per 1000 wanita pada kelompok umur 15-49 tahun. Angka ini dapat digunakan untuk membedakan fertilitas menurut umur. ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari perempuan yang terpapar untuk melahirkan yaitu perempuan usia subur dengan memperhatikan karakteristik kelompok umurnya. Secara alamiah potensi fekunditas perempuan untuk melahirkan berbeda menurut umur dan relatif menjadi steril/tidak subur setelah menopause atau usia 49 tahun keatas. Secara sosial ada kecenderungan bahwa saat ini perempuan ingin membatasi jumlah anak setelah umur 35 tahun.

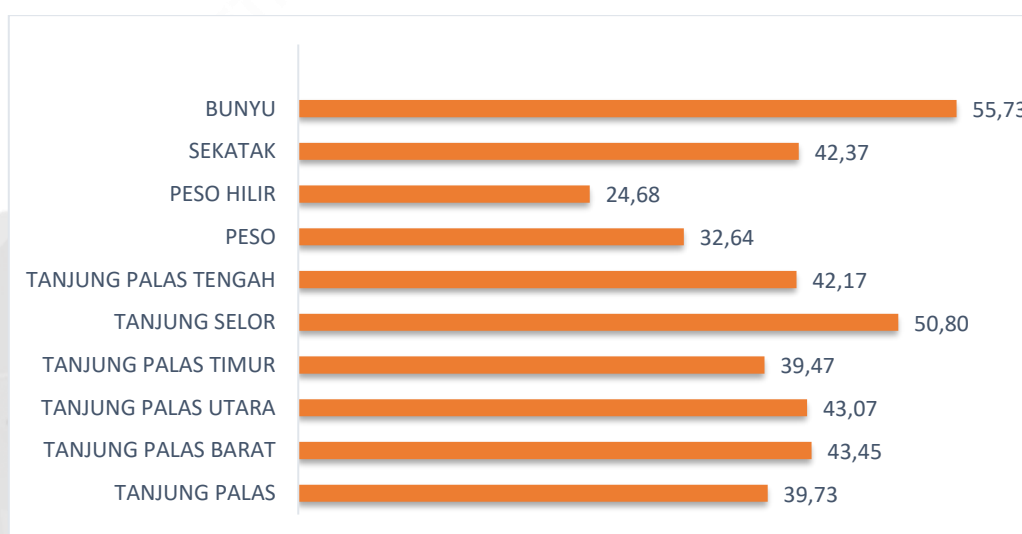
Pengetahuan mengenai ASFR akan berguna untuk pelaksanaan program KB dan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Indikator ASFR merupakan data dasar untuk mengembangkan proyeksi penduduk untuk mengetahui jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin dimasa yang akan datang. Hasil proyeksi penduduk merupakan basis data untuk perencanaan pembangunan manusia di tahun-tahun mendatang.

Tabel 4.1: Angka Kelahiran Menurut Usia

KECAMATAN	PEREMPUAN USIA (15-49)	ANGKA KELAHIRAN	ASFR
TANJUNG PALAS	4.908	195	39,73
TANJUNG PALAS BARAT	1.703	74	43,45
TANJUNG PALAS UTARA	2.995	129	43,07
TANJUNG PALAS TIMUR	5.093	201	39,47
TANJUNG SELOR	17.482	888	50,80
TANJUNG PALAS TENGAH	3.201	135	42,17
PESO	1.103	36	32,64
PESO HILIR	1.013	25	24,68
SEKATAK	3.068	130	42,37
BUNYU	2.889	161	55,73
JUMLAH	43.455	1.974	45,43

Dari Tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa ASFR di Kabupaten Bulungan sebesar 45 artinya dari 1.000 penduduk perempuan usia 15-49 tahun terjadi kelahiran 45 jiwa. Dari data ini dapat dilihat bahwa angka ASFR di Kabupaten Bulungan mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 50,12. Jika dilihat per Kecamatan nilai ASFR tertinggi adalah Kecamatan Tanjung Selor sebesar 50,00 dan terendah adalah Kecamatan Peso Hilir sebesar 24,68 Namun seluruh Kecamatan mengalami penurunan pada angka ASFR dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik 4.1: Angka Kelahiran Menurut Usia



2. Rasio Anak dan Perempuan (Child Women Ratio/CWR)

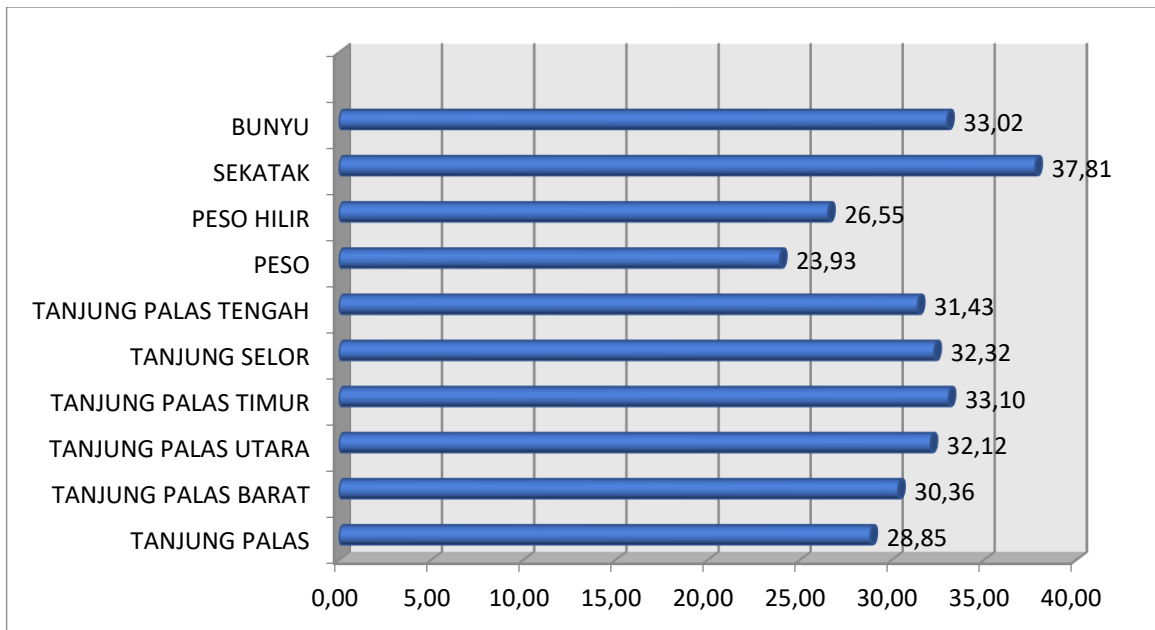
Rasio anak dan perempuan adalah perbandingan antara anak di bawah usia lima tahun dengan jumlah penduduk perempuan usia produktif (15-49 tahun) disuatu wilayah dan waktu tertentu. Rasio anak dan perempuan bisa digunakan untuk melihat jumlah kelahiran yang terjadi. Tabel data rasio anak dan perempuan di Kecamatan se-Kabupaten Bulungan yaitu:

Tabel 4.2: Rasio Anak dan Perempuan

KECAMATAN	Jumlah Perempuan 15-49 (Jiwa)	Jumlah Penduduk 0-4 (Jiwa)	Rasio Anak dan Perempuan (CWR)
TANJUNG PALAS	4.908	1.416	28,85
TANJUNG PALAS BARAT	1.703	517	30,36
TANJUNG PALAS UTARA	2.995	962	32,12
TANJUNG PALAS TIMUR	5.093	1.686	33,10
TANJUNG SELOR	17.482	5.651	32,32
TANJUNG PALAS TENGAH	3.201	1.006	31,43
PESO	1.103	264	23,93
PESO HILIR	1.013	269	26,55
SEKATAK	3.068	1.160	37,81
BUNYU	2.889	954	33,02
JUMLAH	43.455	13.885	31,95

Pada tahun 2023, besarnya rasio anak dan perempuan di Kabupaten Bulungan sebesar 31 hal ini berarti bahwa diantara 100 perempuan usia produktif terdapat 31-32 balita. Tahun 2023 CWR tertinggi di Kecamatan Sekatak yaitu 37,81 disusul Kecamatan Tanjung Palas Timur sebesar 33,1; kemudian Kecamatan Bunyu 33,02. Angka CWR di Kabupaten Bulungan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik4.2: Rasio Anak dan Perempuan



B. Perekonomian

Dari sisi ekonomi salah satu faktor yang disajikan adalah informasi ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi seiring dengan penyerapan tenaga kerja atau dengan kata lain jika ada pertumbuhan ekonomi maka otomatis penyerapan pertumbuhan tenaga kerja juga ada. Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas, tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring bertambahnya dinamika penduduk setiap tahun. Data tentang situasi ketenagakerjaan merupakan salah satu data pokok yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian, sosial, bahkan tingkat kesejahteraan penduduk disuatu wilayah dan dalam kurun waktu tertentu.

Jika mengacu UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, BAB I pasal 1 ayat 2 menyatakan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang / jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan definisi tenaga kerja menurut International Labour Organization (ILO) adalah penduduk usia kerja (penduduk berumur 15 tahun keatas) yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud untuk memperoleh uang / pendapatan atau membantu melakukan kegiatan ekonomi. Batasan ini sejalan dengan ketentuan perundangan, khususnya bidang ketenagakerjaan yang membatasi usia minimum pekerja adalah 15 tahun.

1. Proporsi Jenis Pekerjaan

Data penduduk di Kabupaten Bulungan yang mempunyai jenis pekerjaan sesuai dengan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Tahun 2023 semester 2 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3: Jenis Pekerjaan Penduduk

KECAMATAN	BELUM /TIDAK BEKERJA	APARATUR /PEJABAT NEGARA	TENAGA PENGAJAR	WIRASWASTA	PERTANIAN /PETERNAKAN	NELAYAN	AGAMA DAN KEPERCAYAAN	PELAJAR /MAHASISWA	TENAGA KESEHATAN	PENSUNAN	LAINNYA
TANJUNG PALAS	6.546	703	97	2.552	1.630	1.205	30	2.026	44	95	3.605
TANJUNG PALAS BARAT	2.700	122	23	608	1.422	57	15	703	11	18	1.243
TANJUNG PALAS UTARA	4.165	225	57	1.702	1.878	149	13	1.237	23	16	2.261
TANJUNG PALAS TIMUR	7.873	211	74	2.093	2.898	919	30	2.288	19	18	3.746
TANJUNG SELOR	23.025	5.170	449	11.232	2.860	1.763	81	7.612	307	462	10.627
TANJUNG PALAS TENGAH	4.307	111	44	1.006	1.634	1.460	8	1.328	13	10	2.518
PESO	1.569	113	24	431	969	4	13	509	12	25	625
PESO HILIR	1.504	56	15	376	1.089	7	7	502	8	13	608
SEKATAK	5.338	230	63	1.090	1.100	754	9	947	13	6	2.411
BUNYU	4.549	215	77	2.440	172	380	10	1.464	21	46	2.584
TOTAL	61.576	7.156	923	23.530	15.652	6.698	216	18.616	471	709	30.228

Tabel. 4.3 diatas menunjukkan penduduk yang bekerja berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan dan tercatat di administrasi kependudukannya.

Jika merujuk tabel di atas juga terlihat bahwa sektor swasta banyak memberikan lapangan kerja dan sektor wiraswasta merupakan salah satu pilihan utama bagi penduduk untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Begitu pula sektor pertanian dan perikanan masih memberikan peluang pekerjaan yang banyak dan kedepan dapat lebih dimaksimalkan dengan melihat masih besarnya potensi ekonomi yang dapat dijadikan sumber penghasilan bagi penduduk Kabupaten Bulungan. Selain itu angka Pelajar / Mahasiswa sebanyak 18.616 jiwa (13%) merupakan peluang dan tantangan bagi pemerintah untuk mengembangkan menjadi sumber daya manusia yang dinamis, terampil, dan menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi sehingga kelak akan membantu meningkatkan perekonomian di Kabupaten Bulungan. Perencanaan pembangunan khususnya di sektor ketenaga kerjaan sangat penting

untuk wilayah Kabupaten Bulungan khususnya di ibukota Kabupaten untuk menciptakan kualitas pembangunan masyarakat.

2. Angka Pengangguran (Tingkat Pengangguran)

Pengangguran merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik yang belum pernah bekerja maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan atau mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan atau mereka yang putus asa untuk memperoleh pekerjaan. Berikut ini disajikan data perkiraan pengangguran berdasarkan hitungan selisih penduduk Belum / Tidak Bekerja dengan penduduk prasekolah 0-6 tahun, penduduk usia 7 tahun keatas dianggap memiliki pekerjaan atau berstatus sebagai Pelajar / Mahasiswa. Hasil estimasi angka pengangguran adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4: Jumlah Angka Pengangguran/Tidak Bekerja

KECAMATAN	TIDAK BEKERJA		BEKERJA		ANGKATAN KERJA
	JML	%	JML	%	
TANJUNG PALAS	1.978	25,96	5.641	74,04	7.619
TANJUNG PALAS BARAT	1.057	35,12	1.953	64,88	3.010
TANJUNG PALAS UTARA	1.217	26,01	3.462	73,99	4.679
TANJUNG PALAS TIMUR	2.350	28,94	5.770	71,06	8.120
TANJUNG SELOR	6.387	23,51	20.781	76,49	27.168
TANJUNG PALAS TENGAH	1.093	21,72	3.939	78,28	5.032
PESO	612	30,82	1.374	69,18	1.986
PESO HILIR	528	28,27	1.340	71,73	1.868
SEKATAK	1.548	33,78	3.034	66,22	4.582
BUNYU	1.410	31,85	3.017	68,15	4.427
JUMLAH	18.180	26,54	50.311	73,46	68.491

Tabel 4.4 menunjukkan angka Belum / Tidak bekerja di Kabupaten Bulungan sebesar 18.180 jiwa atau sebesar 26,54 %. Dari tabel tersebut angka pengangguran tertinggi berada di Kecamatan Tanjung Palas Barat sebesar 35,12 %, Sekatak sebesar 33,78 % jiwa diikuti Bunyu yakni 31,85 %. Hal ini perlu perhatian khusus dari

pemerintah Kabupaten Bulungan untuk menyediakan sarana dan prasarana pelatihan kerja serta meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh keterampilan kerja.

C. Sosial

1. Angka Penyandang Cacat (Disabilitas)

Isu sosial berikutnya adalah disabilitas. Informasi tentang banyaknya penduduk penyandang cacat dan jenis kecacatannya sangat diperlukan pemerintah daerah dalam memberikan program atau infrastruktur pelayanan publik yang ramah penyandang disabilitas / penyandang cacat, data penyandang cacat Kabupaten Bulungan disajikan pada halaman berikut :

Tabel 4.5: Angka Penyandang Cacat (Disabilitas)

NO	KECAMATAN	DISABIL ITAS FISIK	DISABIL ITAS NETRA/ BUTA	DISABIL ITAS RUNGU /WICAR A	DISABI LITAS MENT AL/JIW A	DISABI LITAS FISIK DAN MENT AL	DISABI LITAS LAINN YA	JUMLAH
1	TANJUNG PALAS	11	6	6	25	5	6	41
2	TANJUNG PALAS BARAT	1	2	5	4	2	7	17
3	TANJUNG PALAS UTARA	8	3	6	4	1	4	26
4	TANJUNG PALAS TIMUR	10	3	7	5	1	4	27
5	TANJUNG SELOR	25	17	33	44	9	16	89
6	TANJUNG PALAS TENGAH	5	3	7	4	0	2	19
7	PESO	5	5	2	3	1	3	16
8	PESO HILIR	10	2	5	3	2	1	21
9	SEKATAK	7	3	1	1	0	9	17
10	BUNYU	3	2	9	12	1	1	23
	TOTAL	85	46	81	105	22	53	392

Jumlah penyandang cacat di Kabupaten Bulungan penduduk tahun 2023 tercatat 392 jiwa atau naik dari tahun 2022. Angka ini tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Bulungan Meskipun jumlahnya kecil, penduduk penyandang cacat tetap harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Bulungan untuk tetap diberikan pelayanan sosial bagi mereka seperti pendidikan, kesehatan dan fasilitas layanan umum lainnya.

BAB V

KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Dokumen kependudukan adalah kunci akses terhadap pelayanan publik yang disediakan pemerintah bagi seluruh warga negara. Sebagai warga negara kita wajib memiliki dokumen kependudukan seperti KTP Elektronik, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan Akta Perceraian. Dokumen kependudukan ini berkekuatan hukum mengikat secara perdata bagi pemiliknya. Misalnya akta kelahiran, menunjukkan hubungan perdata dari pemilik akta dengan orang tuanya, akta kematian juga menunjukkan hubungan perdata dengan ahli waris, demikian pula akta-akta yang lain. Bagi pemerintah, kepemilikan dokumen kependudukan bermanfaat dalam melakukan kegiatan pengadministrasian penduduk berdasarkan hak legalnya serta memperkuat database kependudukan bagi peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

A. Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh keluarga. Kartu keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. Untuk menghindari kepala keluarga ganda, maka perempuan bisa menjadi kepala keluarga karena status perkawinannya janda maupun karena menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat dari seorang laki-laki, sedangkan suaminya menjadi kepala keluarga hanya di salah satu istri, sesuai kesepakatan di dalam keluarga tersebut.

Seorang kepala keluarga bertanggung jawab terhadap anggota keluarga. Kartu Keluarga (KK) merupakan kartu identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga seperti nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, jenis pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dengan kepala keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua, di SIAK terbaru versi 8 ada penambahan golongan darah dan status perkawinan tercatat atau belum tercatat.

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat jumlah persentase kepemilikan kartu keluarga di Kabupaten Bulungan :

Tabel 5.1: Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	SUDAH MEMILIKI KK		BELUM MEMILIKI KK	
			N	%	N	%
1	TANJUNG PALAS	5.758	5.753	99,91	5	0,09
2	TANJUNG PALAS BARAT	2.125	2.124	99,95	1	0,05
3	TANJUNG PALAS UTARA	3.730	3.723	99,81	7	0,19
4	TANJUNG PALAS TIMUR	6.475	6.470	99,92	5	0,08
5	TANJUNG SELOR	20.070	20.046	99,88	24	0,12
6	TANJUNG PALAS TENGAH	3.840	3.839	99,97	1	0,03
7	PESO	1.263	1.261	99,84	2	0,16
8	PESO HILIR	1.291	1.290	99,92	1	0,08
9	SEKATAK	3.696	3.695	99,97	1	0,03
10	BUNYU	3.887	3.885	99,95	2	0,05
	JUMLAH	52.135	52.086	99,91	49	0,09

Tabel 5.1 menunjukkan jumlah keluarga dan jumlah keluarga yang memiliki Kartu Keluarga di Kabupaten Bulungan. Dari 52.086 jumlah keluarga yang memiliki KK adalah 52.086 atau sebesar 99,91 %. Sedangkan jumlah keluarga yang belum memiliki kartu keluarga sebanyak 49 atau sebesar 0,09.

B. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan pasal 63 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP. Dengan memiliki KTP penduduk dapat dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya, misalnya urusan perbankan, sertifikat tanah, perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Jumlah dan proporsi penduduk menurut kepemilikan KTP pada seluruh kabupaten/kota yang ada di Kabupaten Bulungan disajikan pada tabel berikut :

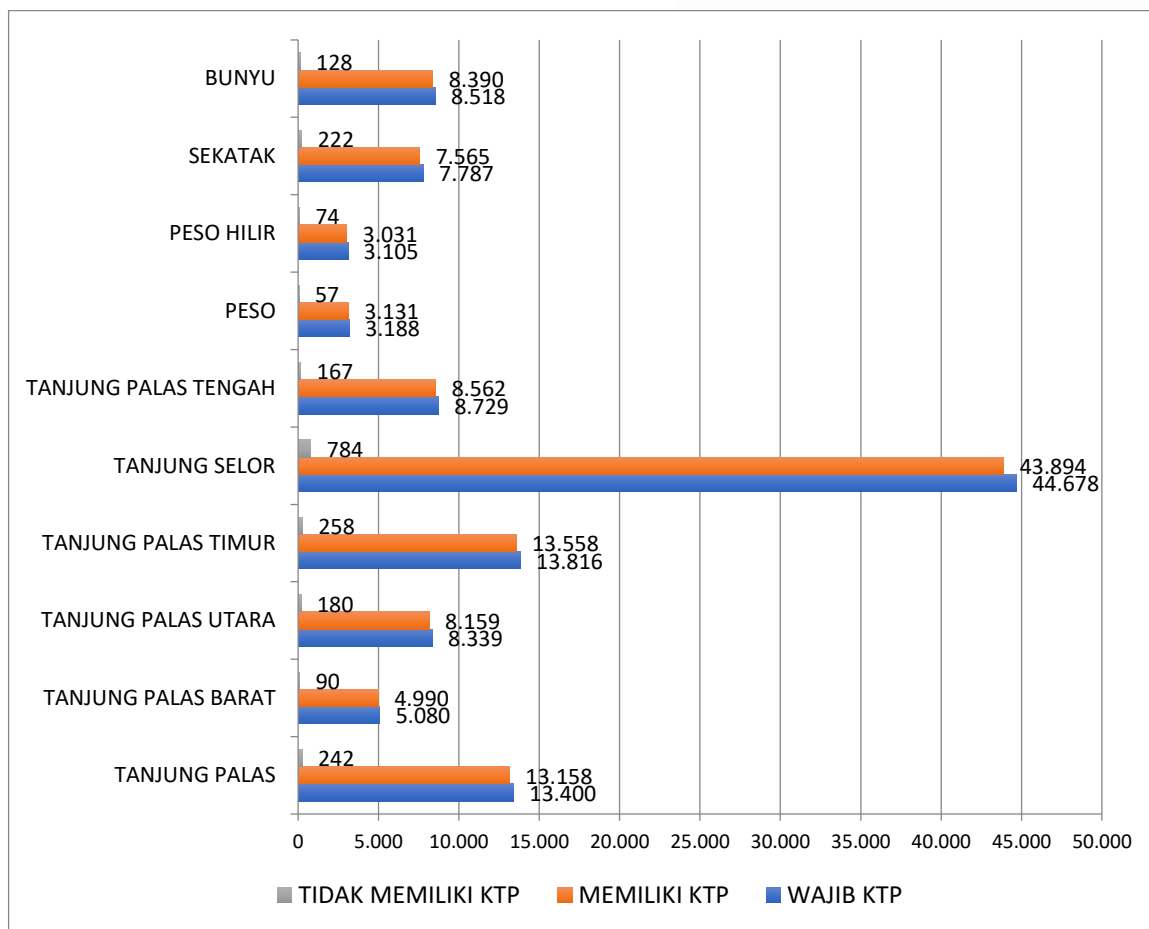
Tabel 5.2: Presentase Kepemilikan KTP-EI

no	kecamatan	JUMLAH PENDUDUK	WAJIB KTP	MEMILIKI KTP	BELUM MEILIKI KTP	%
1	TANJUNG PALAS	18.533	13.400	13.158	242	98,19
2	TANJUNG PALAS BARAT	6.922	5.080	4.990	90	98,23
3	TANJUNG PALAS UTARA	11.726	8.339	8.159	180	97,84
4	TANJUNG PALAS TIMUR	20.169	13.816	13.558	258	98,13
5	TANJUNG SELOR	63.588	44.678	43.894	784	98,25
6	TANJUNG PALAS TENGAH	12.439	8.729	8.562	167	98,09
7	PESO	4.294	3.188	3.131	57	98,21
8	PESO HILIR	4.185	3.105	3.031	74	97,62
9	SEKATAK	11.961	7.787	7.565	222	97,15
10	BUNYU	11.958	8.518	8.390	128	98,50
	JUMLAH	165.775	116.640	114.438	2.202	98,11

Tabel di atas menampilkan penduduk wajib KTP Kabupaten Bulungan yang telah melaksanakan perekaman KTP-EI. Terlihat bahwa dari 112.991 jiwa wajib KTP, sebanyak 110.558 jiwa telah melakukan perekaman atau 97,87%. Sejalan dengan pelaksanaan program pemerintah, penduduk yang masih mempunyai KTP non Elektronik dirubah menjadi KTP Elektronik. Proses perekaman dan pencetakan KTP Elektronik ini terkadang terkendala oleh gangguan jaringan dan distribusi alat dan bahan seperti blangko, ribbon, film dan lain lain yang terbatas. Grafik jumlah kepemilikan Kartu Tanda Penduduk ditampilkan sebagai berikut :



Grafik 5.1: Presentase Kepemilikan KTP-EI



C. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk anak-anak berusia 0-16 tahun atau belum menikah sebagai bukti perhatian pemerintah untuk memberikan dokumen kependudukan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa mengenal usia. Tabel berikut adalah data kepemilikan KIA se-Kabupaten Bulungan:

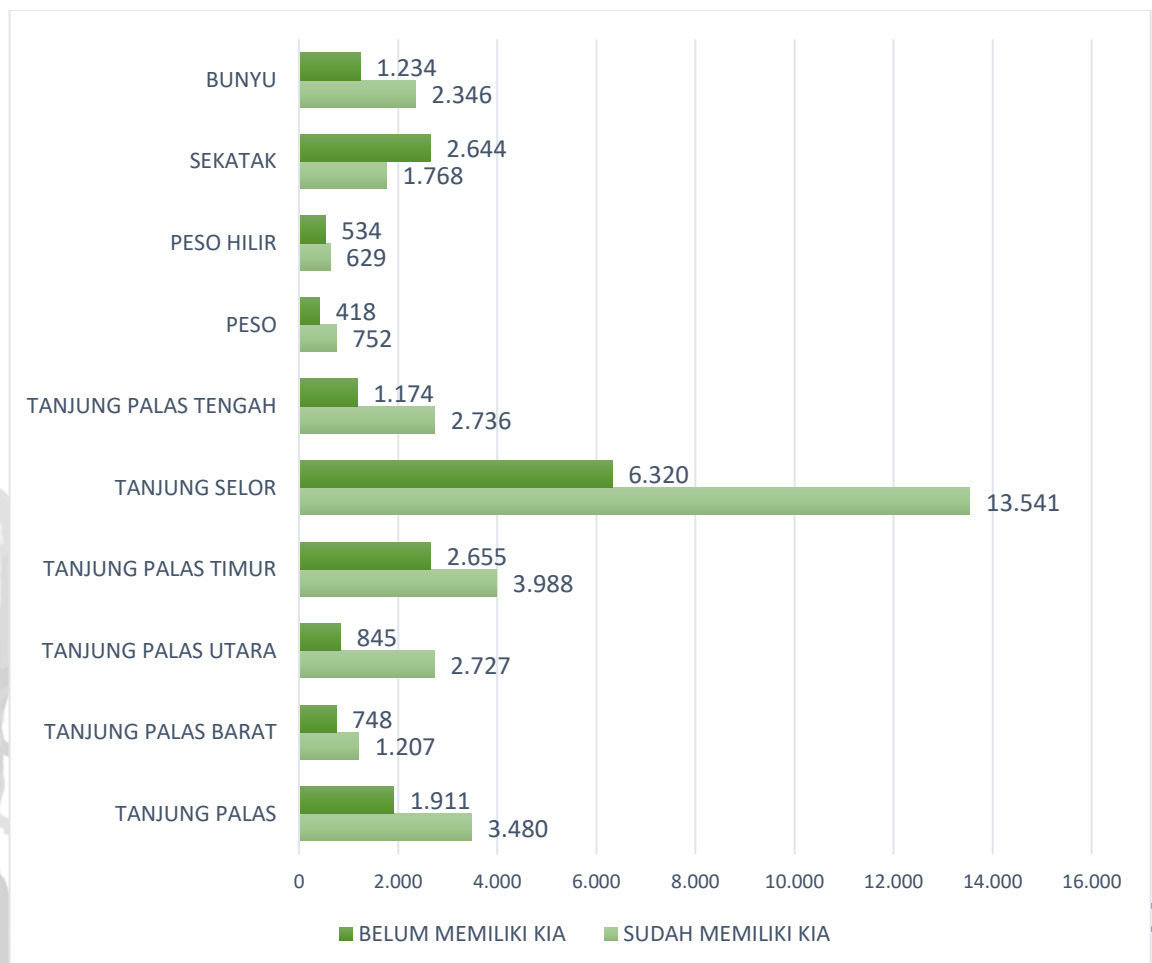
Tabel 5.3: Presentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

NO	KECAMATAN	JUMLAH (0-16) TAHUN	SUDAH MEMILIKI KIA	BELUM MEMILIKI KIA	PRESENTASE KEPEMILIKAN KIA
1	TANJUNG PALAS	5.391	3.480	1.911	64,55
2	TANJUNG PALAS BARAT	1.955	1.207	748	61,74

3	TANJUNG PALAS UTARA	3.572	2.727	845	76,34
4	TANJUNG PALAS TIMUR	6.643	3.988	2.655	60,03
5	TANJUNG SELOR	19.861	13.541	6.320	68,18
6	TANJUNG PALAS TENGAH	3.910	2.736	1.174	69,97
7	PESO	1.170	752	418	64,27
8	PESO HILIR	1.163	629	534	54,08
9	SEKATAK	4.412	1.768	2.644	40,07
10	BUNYU	3.580	2.346	1.234	65,53
	TOTAL	51.657	33.174	18.483	64,22

Dari tabel kepemilikan KIA diatas Kecamatan Tanjung Palas Utara memiliki persentase terbesar 75,03%, Kecamatan Tanjung Palas Tengah 65,35 %, Kemudian Kecamatan yang lainnya yang Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 5.2: Presentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)



D. Kepemilikan Akta

Akta merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia. Akta merupakan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungannya dengan pelayanan legal.

1. Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan bukti legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya. Saat ini untuk mempermudah masyarakat memiliki atau membuat Akta Kelahiran jika masyarakat tidak memiliki dokumen pendukung (surat kelahiran, dll) dapat mengisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk mendapatkannya. Akta kelahiran penting untuk dimiliki oleh seorang anak karena digunakan pada saat mengurus pendidikan atau mengurus dokumen lainnya, data kepemilikan akta kelahiran disajikan sebagai berikut :

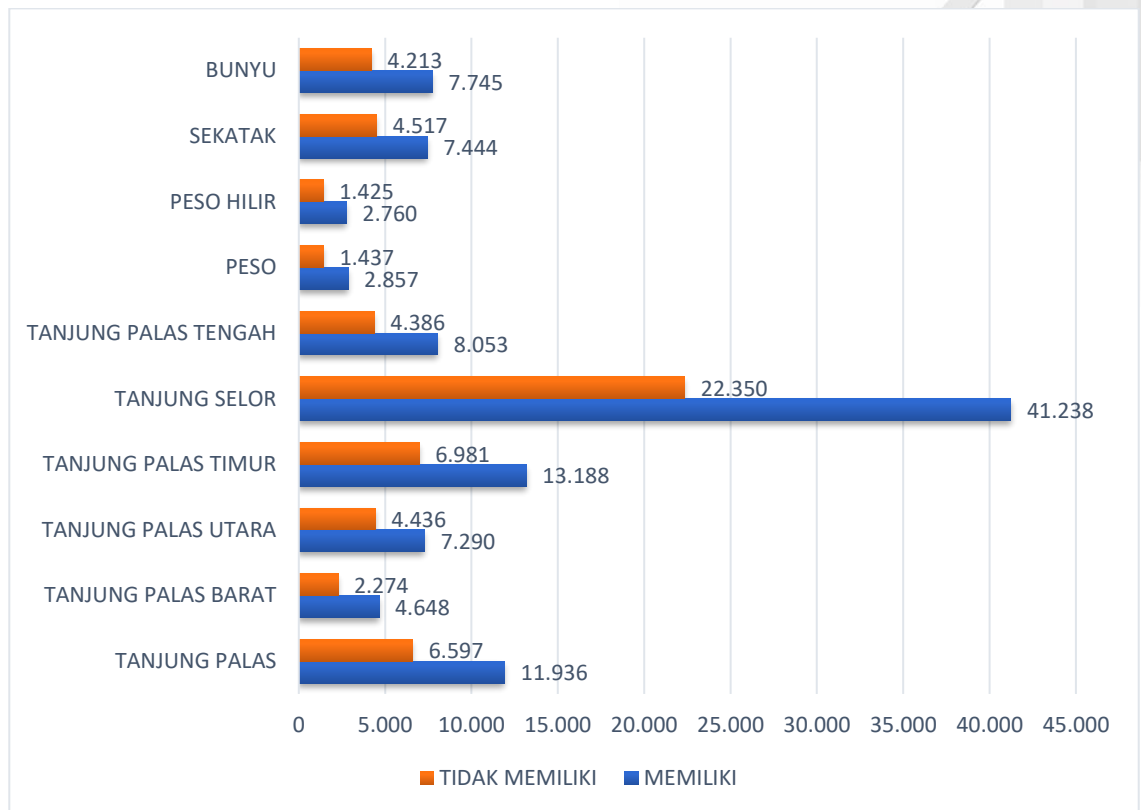
Tabel 5.4: Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	BELUM MEMILIKI	MEMILIKI	PERSEN TASE (%)
1	TANJUNG PALAS	18.533	11.936	6.597	64,40
2	TANJUNG PALAS BARAT	6.922	4.648	2.274	67,15
3	TANJUNG PALAS UTARA	11.726	7.290	4.436	62,17
4	TANJUNG PALAS TIMUR	20.169	13.188	6.981	65,39
5	TANJUNG SELOR	63.588	41.238	22.350	64,85
6	TANJUNG PALAS TENGAH	12.439	8.053	4.386	64,74
7	PESO	4.294	2.857	1.437	66,53
8	PESO HILIR	4.185	2.760	1.425	65,95
9	SEKATAK	11.961	7.444	4.517	62,24
10	BUNYU	11.958	7.745	4.213	64,77
	JUMLAH	165.775	107.159	58.616	64,64

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk Kabupaten Bulungan yang memiliki akta kelahiran sebesar 64,64 persen sebesar 107.159 jiwa, sedangkan sebesar 58.616 jiwa atau 35,36 persen penduduk belum

mempunyai akta kelahiran. Bila dilihat berdasarkan wilayah maka kepemilikan akta kelahiran di Kecamatan Tanjung Palas Barat adalah yang tertinggi. Pada grafik di bawah ini dapat dilihat jumlah kepemilikan akta kelahiran di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan:

Grafik 5.3: Kepemilikan Akta Kelahiran



Data kepemilikan akta kelahiran anak umur 0 – 18 tahun yang menjadi salah satu prioritas kepemilikan dokumen kependudukan seperti disajikan tabel berikut :

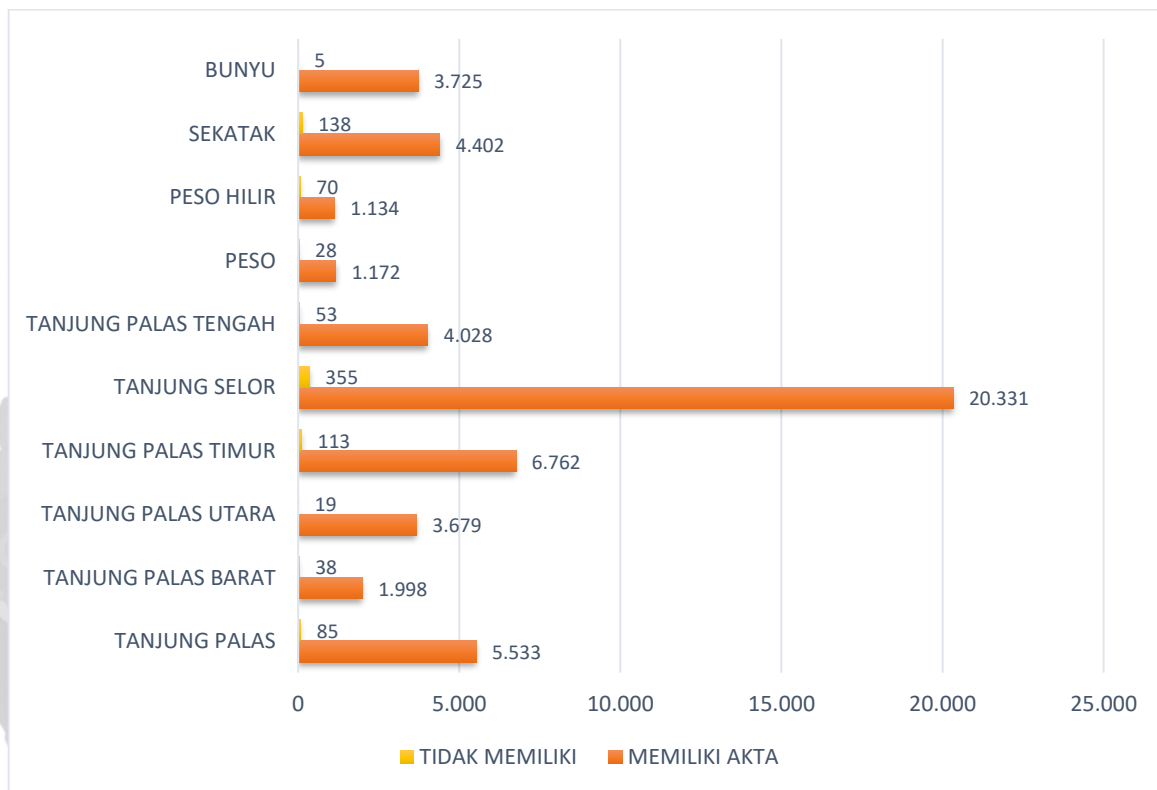
Tabel 5.5: Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18) Tahun

NO	KECAMATAN	JUMLAH USIA 0-18 THN	MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	PERSENTASE (%)
1	TANJUNG PALAS	5.618	5.533	85	98,49
2	TANJUNG PALAS BARAT	2.036	1.998	38	98,13
3	TANJUNG PALAS UTARA	3.698	3.679	19	99,49
4	TANJUNG PALAS TIMUR	6.875	6.762	113	98,36
5	TANJUNG SELOR	20.686	20.331	355	98,28

6	TANJUNG PALAS TENGAH	4.081	4.028	53	98,70
7	PESO	1.200	1.172	28	97,67
8	PESO HILIR	1.204	1.134	70	94,19
9	SEKATAK	4.540	4.402	138	96,96
10	BUNYU	3.730	3.725	5	99,87
TOTAL		53668	52764	904	98,32

Berdasarkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 bahwa Target tahun 2024 Indikator Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-17 tahun adalah 100% maka dari tabel di atas untuk Kabupaten Bulungan masih mencapai 96,55%. Perlu upaya-upaya atau terobosan untuk meningkatkan pencapaian ini dengan pemutakhiran atau peginputan data akta kelahiran bagi penduduk yang sudah memiliki tapi belum terinput dalam database serta kemudahan-kemudahan bagi penduduk yang akan mengurus akta kelahiran. Grafik jumlah kepemilikan akta kelahiran anak umur 0-18 disampaikan sebagai berikut:

Grafik 5.4: Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18) Tahun



2. Akta Perkawinan

Akta perkawinan / nikah merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta perkawinan memberikan kekuatan hukum atas ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat didalamnya. Tabel dibawah ini menyajikan kepemilikan akta perkawinan :

Tabel 5.6: Presentase Kepemilikan Akta Perkawinan

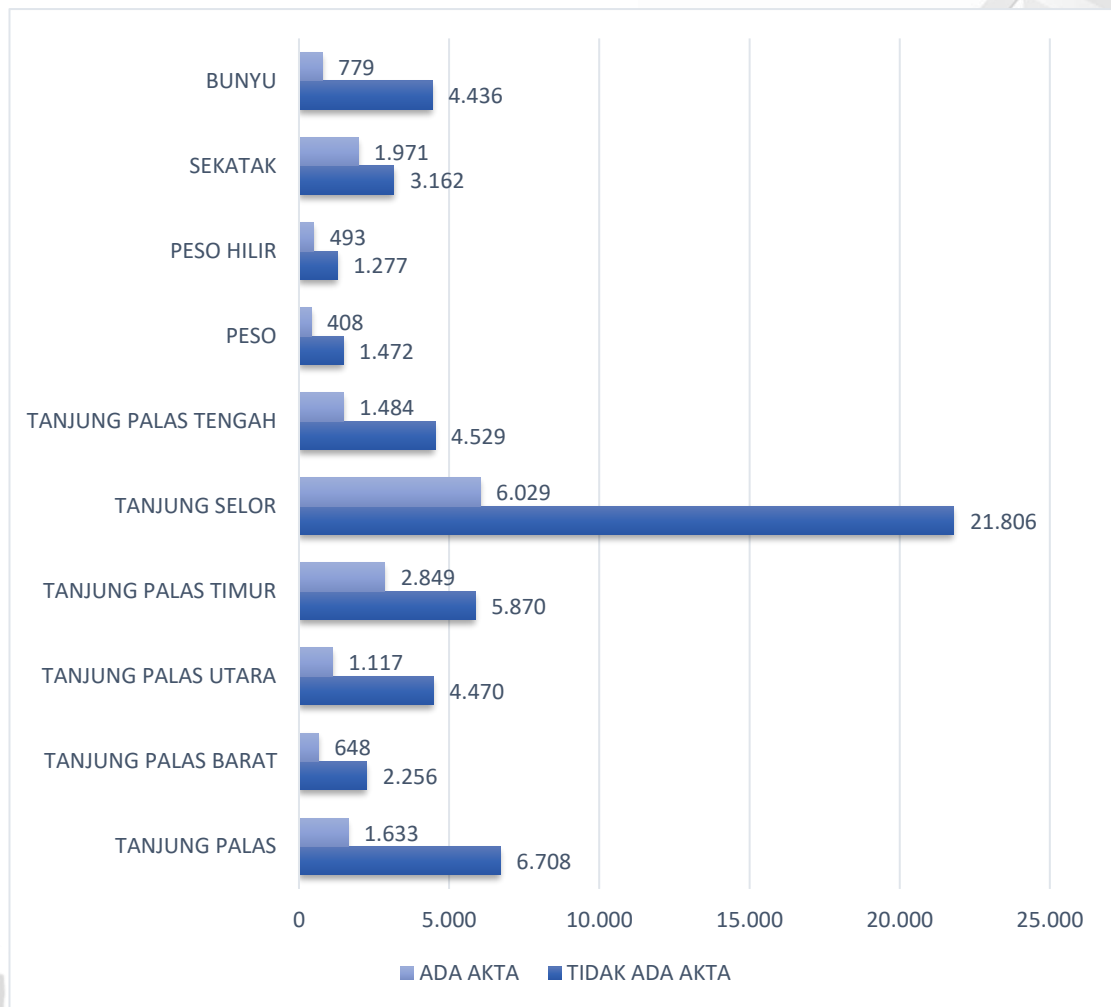
NO	KECAMATAN	JUMLAH	MEMILIKI AKTA	BELUM MEMILIKI AKTA	PERSENTASE (%)
1	TANJUNG PALAS	8.341	6.708	1.633	80,42
2	TANJUNG PALAS BARAT	2.904	2.256	648	77,69
3	TANJUNG PALAS UTARA	5.587	4.470	1.117	80,01
4	TANJUNG PALAS TIMUR	8.719	5.870	2.849	67,32
5	TANJUNG SELOR	27.835	21.806	6.029	78,34
6	TANJUNG PALAS TENGAH	6.013	4.529	1.484	75,32
7	PESO	1.880	1.472	408	78,3
8	PESO HILIR	1.770	1.277	493	72,15
9	SEKATAK	5.133	3.162	1.971	61,6
10	BUNYU	5.215	4.436	779	85,06
	TOTAL	73.397	55.986	17.411	76,28

Tabel 5.6 menyajikan perbandingan penduduk berstatus kawin terhadap kepemilikan akta perkawinan. Jumlah penduduk Kabupaten Bulungan yang berstatus kawin sebanyak 73.397 jiwa, terdapat 55.986 Jiwa (76,28%) yang memiliki akta perkawinan dan 17.411 (23,72%) jiwa yang tidak memiliki akta perkawinan. Masih banyaknya pasangan yang belum memiliki akta pernikahan terjadi karena banyak penduduk yang melakukan perkawinan secara agama atau adat saja tetapi tidak tercatat secara administrasi kependudukan, sehingga perkawinan ini belum diakui secara hukum negara.

Jika dilihat per Kecamatan, dan dibandingkan dengan data pada periode sebelumnya, Bunyu menjadi Kecamatan yang tingkat kepemilikan akta perkawinannya tertinggi 85,06%, Kecamatan sekatak dengan 61,6 %, merupakan Kecamatan yang paling kecil hal ini dapat disebabkan karena

wilayah pusat pemerintahan yang sulit dijangkau dan jauh di pedalaman sehingga penduduk lebih banyak belum mencatatkan perkawinannya baik yang secara agama atau adat. Adapun Grafik jumlah kepemilikan akta perkawinan disampaikan sebagai berikut :

Grafik 5.5: Kepemilikan Akta Perkawinan



3. Akta Perceraian

Pasangan yang telah berpisah dan berstatus cerai hidup wajib memiliki akta perceraian. Tabel di bawah ini menggambarkan jumlah dan persentase penduduk berstatus cerai hidup yang memiliki akta cerai di setiap Kecamatan se Kabupaten Bulungan:

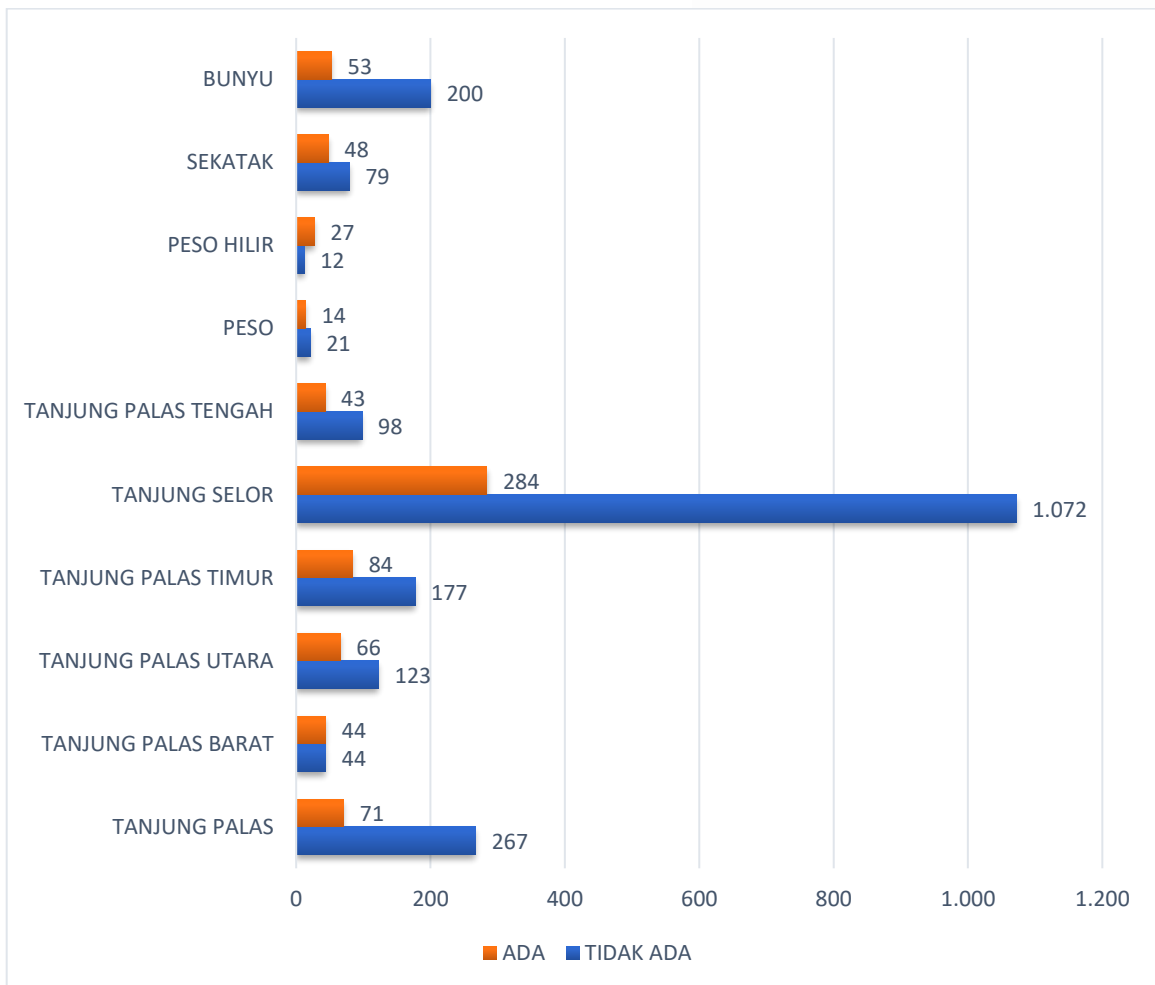
Tabel 5.7: Presentase Kepemilikan Akta Perceraian

NO	KECAMATAN	JUMLAH CERAI	MEMILIKI	BLM MEMILIKI	PERSENTASE (%)
1	TANJUNG PALAS	338	267	71	78,99
2	TANJUNG PALAS BARAT	88	44	44	50
3	TANJUNG PALAS UTARA	189	123	66	65,08
4	TANJUNG PALAS TIMUR	261	177	84	67,82
5	TANJUNG SELOR	1.356	1.072	284	79,06
6	TANJUNG PALAS TENGAH	141	98	43	69,5
7	PESO	35	21	14	60
8	PESO HILIR	39	12	27	30,77
9	SEKATAK	127	79	48	62,2
10	BUNYU	253	200	53	79,05
	TOTAL	2.827	2.093	734	74,04

Tabel 5.7 menunjukkan bahwa penduduk berstatus cerai hidup yang memiliki akta perceraian sebesar 2.827 jiwa atau 74,04% dari penduduk yang berstatus cerai hidup dan yang belum memiliki akta perceraian sebanyak 734 jiwa atau 29,96%. Persentase penduduk cerai hidup yang tidak memiliki akta perceraian masih sangat tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh masyarakat yang belum melaporkan perceraian. Ini perlu menjadi perhatian pemerintah kabupaten/kota dalam merencanakan suatu program kegiatan untuk sosialisasi dan penyuluhan akan pentingnya akta perceraian maupun dokumen kependudukan lainnya. Akta perceraian dengan presentase kepemilikan paling tinggi yaitu di Kecamatan Tanjung Selor.

Apabila data di atas disajikan dalam bentuk grafik, maka akan nampak seperti di bawah ini :

Grafik 5.6: Presentase Kepemilikan Akta Perceraian



4. Akta Kematian

Akta Kematian merupakan dokumen yang diterbitkan bagi warga negara yang telah meninggal atas laporan dari ahli waris atau pihak lainnya. Hal ini terkait dengan status hukum seseorang, baik itu hukum privat maupun hukum publik. Jika pelaporan akta kematian ini berjalan baik maka akan mendukung pendataan penduduk yang lebih tepat dan akurat dari sisi jumlah penduduk agar biodata yang bersangkutan bisa dihapus dari database sehingga tidak mempengaruhi atau muncul masalah dalam hal jumlah penduduk.

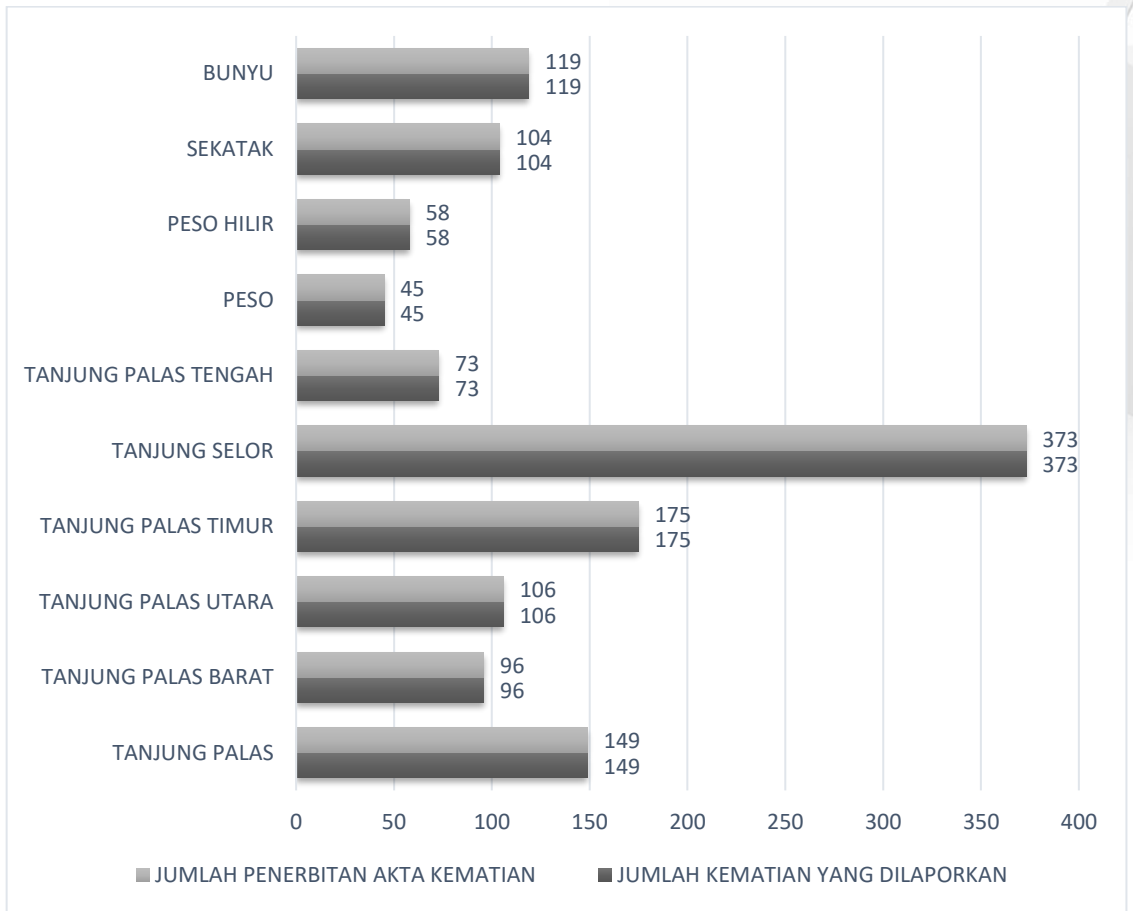
Berikut ini data jumlah kepemilikan akta kematian di Kecamatan di Kabupaten Bulungan :

Tabel 5.8: Presentase Kepemilikan Akta Kematian

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEMATIAN YANG DILAPORKAN	JUMLAH PENERBITAN AKTA KEMATIAN
1	TANJUNG PALAS	149	149
2	TANJUNG PALAS BARAT	96	96
3	TANJUNG PALAS UTARA	106	106
4	TANJUNG PALAS TIMUR	175	175
5	TANJUNG SELOR	373	373
6	TANJUNG PALAS TENGAH	73	73
7	PESO	45	45
8	PESO HILIR	58	58
9	SEKATAK	104	104
10	BUNYU	119	119
	JUMLAH	1.298	1.298

Dilihat dari tabel di atas, terdapat 1.298 kematian yang dilaporkan dan 1.298 penerbitan akta kematian. Kecamatan Tanjung Selor jumlah akta kematiannya yang paling besar dikarenakan jumlah kematian yang dilaporkan juga besar, sedangkan jumlah akta kematian adalah akta kematian yang dicetak sampai dengan tahun 2022, sehingga penerbitan akta kematian lebih sedikit daripada jumlah kematian penduduk yang dilaporkan. Jadi, jumlah akta kematian ini bisa berasal dari laporan kematian sebelum tahun 2022 dan baru diterbitkan akta kematiannya pada tahun 2022. Penerbitan akta kematian di Kecamatan Tanjung Selor merupakan yang tertinggi di Kabupaten Bulungan hal ini dapat dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan pembuatan akta kematian sudah tumbuh dan adanya kerjasama dengan instansi terkait lainnya baik di kelurahan maupun kecamatan dan / atau instansi yang mengurus pemakaman. Grafik jumlah kepemilikan akta kematian disampaikan sebagai berikut :

Grafik 5.7: Kepemilikan Akta Kematian



BAB VI

PENUTUP

Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bulungan Tahun 2024 ini memuat data kependudukan Kabupaten Bulungan Tahun 2023 yang bersumber dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Buku ini kami harapkan dapat digunakan oleh instansi pemerintah dan / atau swasta maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan serta bermanfaat sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Bulungan.

Untuk mendukung penyusunan dan penyajian Profil Perkembangan Kependudukan tahun berikutnya, diperlukan usaha dan dukungan stake holder yang terkait khususnya perbaikan data atau pemutakhiran data kependudukan setiap periode sehingga penyajian tahun yang akan datang lebih baik dan akurat.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna sehingga kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan mendatang sangat dibutuhkan, baik dari pengguna data maupun pemerhati masalah kependudukan. Demikian dan Terimakasih.